



**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur**

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

**TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis DLH Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renstra DLH menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja DLH pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra DLH Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2023, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi DLH Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, Januari 2024

Kepala Dinas,

Drs. ANDI MAKKARAKA.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650406 198603 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Isu Strategis	6
1.4 Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP	80
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu timur 3
Tabel 2	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Luwu Timur Tahun 2022 3
Tabel 3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 16
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah 18
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja 21
Tabel 6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I 24
Tabel 7	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya 28
Tabel 8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)..... 30
Tabel 9	Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota 32
Tabel 10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran..... 36
Tabel 11	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup 38
Tabel 12	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 40
Tabel 13	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 42

Tabel 14	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.....	44
Tabel 15	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Bercun (Limbah B3)	45
Tabel 16	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).....	47
Tabel 17	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH.....	51
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	53
Tabel 19	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	55
Tabel 20	Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Persampahan n.....	57
Tabel 21	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung.....	60
Tabel 22	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya	62
Tabel 23	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026).....	63
Tabel 24	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung	64
Tabel 25	Pencapaian Kinerja Anggaran.....	69
Tabel 26	Efisiensi Pengguna Sumber Daya.....	69
Tabel 27	Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur	75

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 Capaian Kinerja Indek Kualitas Air Tahun 2023	22
Grafik 2 Capaian Kinerja Indek Kualitas udara Tahun 2023	22
Grafik 3 Capaian Kinerja Indek Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023 .	22
Grafik 4 Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2023	23
Grafik 5 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2023	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Lingkungan Hidup yang semula bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang secara spesifik tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pada Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 yang kemudian disusul dengan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 37 tahun 2018 tentang dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, dan pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fungsi :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 162 orang, sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tenaga ASN dan tenaga upah jasa. Tenaga ASN berjumlah 24 orang yang terdiri dari laki-laki 14 orang dan perempuan 10 orang, sedangkan tenaga upah jasa berjumlah

138 orang yang terdiri dari laki-laki 77 orang dan perempuan 61 orang. Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur

No	Status	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ASN	14	10	24
2	Upah Jasa	77	61	138

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tercantum pada tabel berikut :

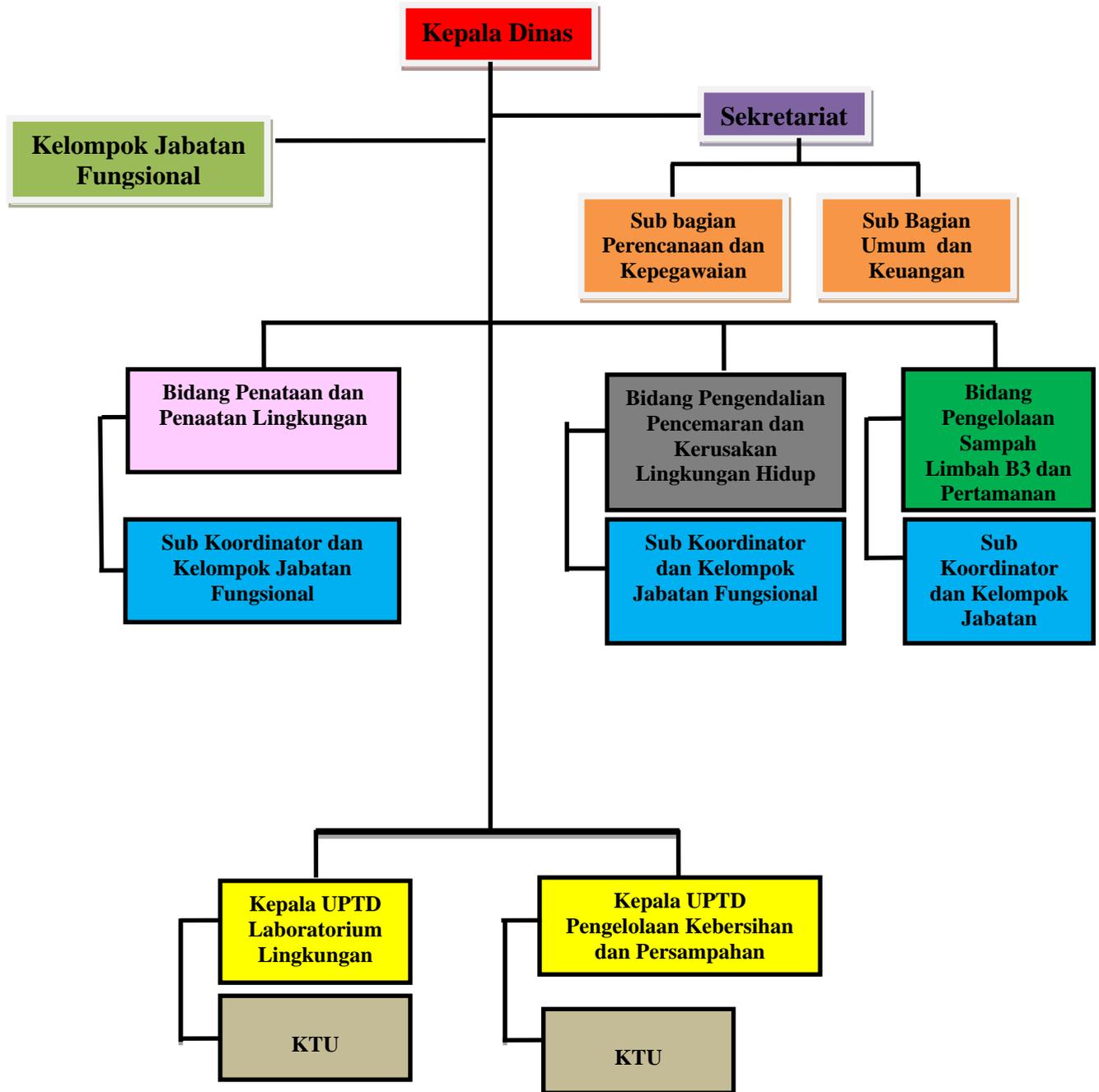
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

No	GOL	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA / SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD / SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	IV	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2	III	2	4	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10
3	II	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Upah Jasa	-	-	1	14	1	-	31	13	13	6	31	28	77	61
Jumlah														91	71

Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 24 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 orang untuk golongan IV; S1 sebanyak 19 orang untuk golongan III; dan SMA/Sederajatnya sebanyak 1 orang untuk golongan II .

Jumlah tenaga Upah Jasa Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 138 orang yang terdiri dari upah jasa pelayanan umum : 21 orang dan upah jasa tenaga kebersihan 117 orang. Upah jasa tenaga umum dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 14 orang, SMA/Sederajatnya sebanyak 6 orang dan SD sederajat sebanyak 1 orang. Upah jasa tenaga kebersihan sebanyak 117 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang; D3 sebanyak 1 orang; SMA sebanyak 38 orang; SMP sebanyak 19 orang; SD sebanyak 52 orang dan tidak sekolah sebanyak 6 orang.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur



1.3 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Isu-isu strategis lingkungan yang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan; Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.
2. Peningkatan beban pencemaran; Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun.
3. Perubahan iklim; Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap

kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur memiliki permasalahan utama (Strategic Issued) antara lain :

1. Pencemaran Air

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah industri tambang disamping itu juga memiliki 3 Danau besar, beberapa sungai besar dan garis pantai yang panjang sehingga Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah yang rawan pencemaran air.

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur), Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

- Meningkatnya kandungan nutrisi dapat mengarah pada eutrofikasi.
- Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.

- Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
- Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai
- Pencemaran air oleh sampah
- Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah suatu peristiwa masuk atau tercampurnya polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang bisa mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Pada dasarnya, secara alamiah alam itu mampu mendaur ulang berbagai macam jenis limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, akan tetapi jika konsentrasi limbah yang dihasilkan sudah tidak sebanding dengan laju proses daur ulang maka itulah yang menyebabkan pencemaran. Dalam studi dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan yang paling berpengaruh yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara akan menimbulkan dampak negatif, terkhusus lagi bagi kehidupan di muka bumi.

Secara umum pencemaran udara di Kabupaten Luwu Timur bersumber dari cerobong asap industri, kabut asap (dampak dari kebakaran hutan), gas buang kendaraan, debu dan masih banyak sumber pencemaran udara lainnya.

3. Penurunan Kualitas Sumberdaya Alam

Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam ditandai dengan terjadinya degradasi lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan sumber daya alam. Degradasi ialah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (antropogenik) ataupun alami.

Kenyataan yang terjadi bahwa manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam telah mengakibatkan berbagai dampak yang cenderung menurunkan kualitas maupun kuantitas sumber daya alam tersebut.

Secara umum penurunan kualitas sumberdaya alam di Kabupaten Luwu Timur diakibatkan pembukaan lahan hutan yang tidak terkontrol, baik itu lahan pertambangan, pertanian, perkebunan, tambak dan perumahan sehingga perlu peran pemerintah daerah untuk mengontrol kerusakan sumberdaya alam.

4. Persampahan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsumtif sudah tentu diikuti dengan meningkatnya produksi sampah. Di semua daerah, sampah selalu menimbulkan masalah yang rumit untuk dipecahkan. Manusia mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi bahan makanan, minuman, barang dan lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Di sisi lain aktivitas tersebut menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi, namun di sisi lain aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang tidak diinginkan atau tidak berguna. Makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan ketersediaan ruang hidup

manusia yang relatif tetap, dan bahan buangan ini dikenal dengan sampah.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengurai sampah, khususnya sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan sampah yang bersifat anorganik, artinya sangat sulit terurai menjadi satu dengan tanah. Berbeda dengan sampah organik, yang tergolong mudah untuk terdekomposisi menjadi pupuk.

Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan seringkali berdampak negatif bagi lingkungan, mulai dari banjir sampai timbulnya masalah-masalah penyakit. Kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu Timur masih perlu ditingkatkan pentingnya akan kebersihan lingkungan. Kesadaran dan perilaku, merupakan dua hal yang sangat sulit untuk diubah. Untuk mengubah perilaku manusia, diperlukan strategi dan tahapan-tahapan tertentu.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Rencana strategis juga merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah

perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

A. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Lingkungan Hidup mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

b. MISI

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

“Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas ”

c. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh sebuah Organisasi Perangkat Daerah oleh karena itu Tujuan Strategis harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah menentukan tujuan strategis yaitu :

“Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”

A. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria yang spesifik, dapat dinilai dan terukur menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah**

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Point	27	27.50	28	28.20	28.50	28.50
		Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Udara	Point	29.50	29.55	29.60	29.65	29.70	29.70
		Indeks Tutupan Lahan	Point	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Persen	60.55	60.56	60.57	60.58	70.00	70.00

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 merupakan target kinerja tahun ke tiga dari renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 terdapat rumusan sasaran, indikator dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023.

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah (dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur) kepada atasan langsungnya (dalam hal ini Bupati Kabupaten Luwu Timur), perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh pimpinan unit kerja dalam 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	28.00 Point
		Indeks Kualitas Udara	29,60 Point
		Indeks Tutupan Lahan	30,50 Point
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	60,57 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.117.729.856,00	
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 203.846.940,00	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 804.305.412,00	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 147.909.060,00	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 59.854.060,00	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 126.208.000,00	
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat	Rp. 27.095.000,00	

	Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 55.683.262,00	
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 18.595.000,00	
9	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 3.969.875.460,00	
	JUMLAH	Rp. 9.531.102.050,00	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan pengukuran evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

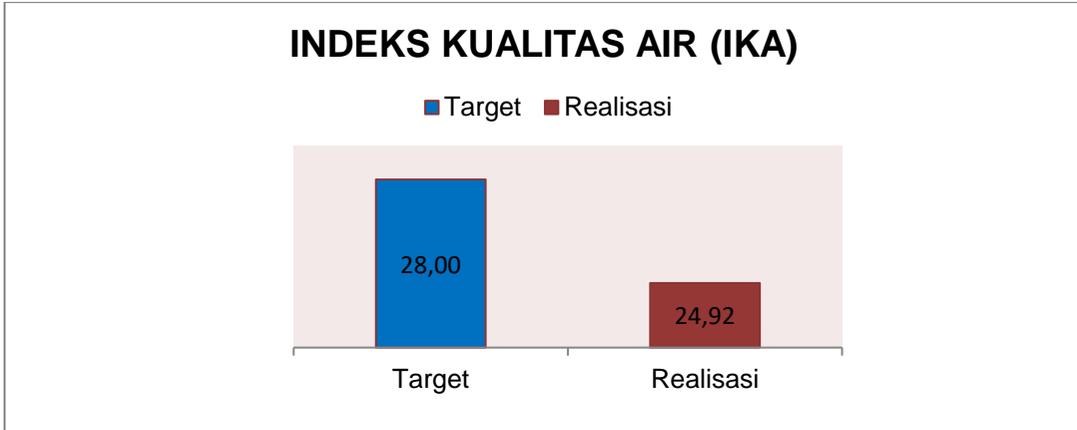
Tabel. 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	28.00	24.92	89.00%
		Indeks Kualitas Udara	29.60	38.87	131.31%
		Indeks Tutupan Lahan	30.5	16.31	53.48%
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	60.57	79.50	131.25%

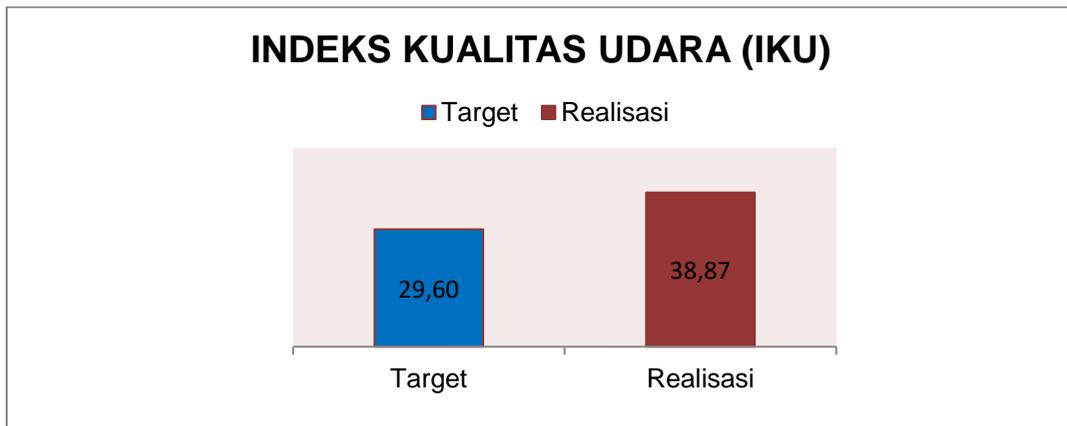


Sasaran Strategis 1

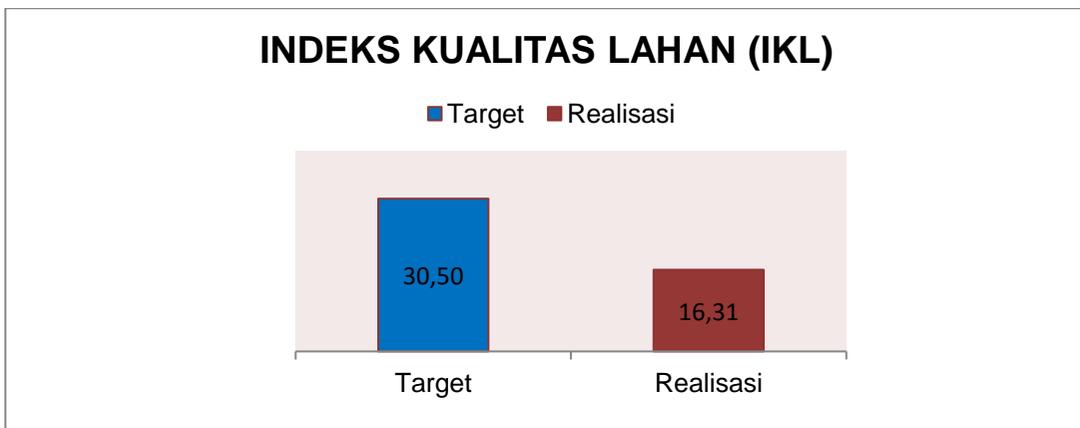
Meningkatnya Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan



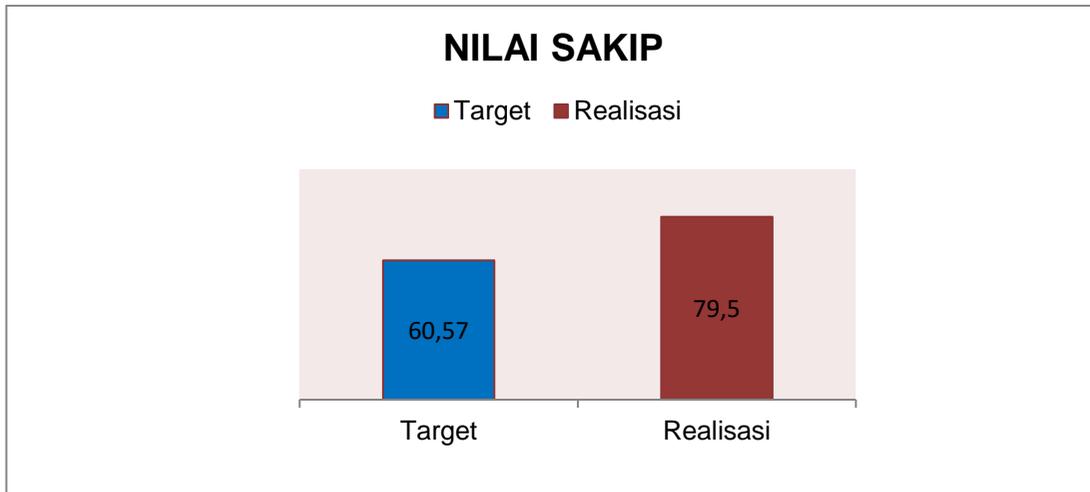
Grafik. 3. 1
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2023



Grafik. 3. 2
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2023



Grafik. 3.3
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023

Sasaran 2 (Sasaran Pendukung)**Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah****Grafik. 3.4****Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2023****ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi

daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS 1

“Meningkatnya Indeks Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan”

Tabel. 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I

Sasaran I	Meningkatnya Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	28.00	24.92	89.00%
Indeks Kualitas Udara	29.60	38.87	131.31%
Indeks Tutupan Lahan	30.5	16.31	53.48%

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

➤ Indeks Kualitas Air

Hasil perhitungan IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,92 sedangkan target IKA pada tahun 2023 sebesar 28.00. Nilai IKA yang diperoleh belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan rumus, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan. Perhitungan IKA pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

Tabel bobot Indeks Pencemar

No	Mutu Air	Bobot Nilai Indeks Pencemar
1	Memenuhi (Baik)	70
2	Cemar Ringan	50
3	Cemar Sedang	30
4	Cemar Berat	10

No	Kategori IKA	Angka Rentang
1	Baik	70
2	Sedang	$50 \leq X \leq 70$
3	Kurang	$25 \leq X \leq 50$
4	Sangat Kurang	$0 \leq X \leq 25$

➤ Indeks Kualitas Udara

Terdapat peningkatan pada nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai IKU pada tahun 2023 adalah 38,87 yang mengindikasikan kenaikan nilai indeks sekitar 0,69 dari tahun 2022 yang berkisar 38,18. Nilai tersebut juga melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2023 yakni sekitar 29,60.

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

Indeks Kualitas Udara (IKU)				
Sangat baik	•	X	>	90
Baik	• 70	<	X	≤ 90
Cukup	• 50	≤	X	≤ 70
Kurang	30	≤	X	< 50
Sangat Kurang		X	<	30

➤ Indeks Tutupan Lahan

Komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 0,21 dari nilai IKL 16,52 pada tahun 2022 menjadi 16,31 pada tahun 2023. Penurunan nilai indeks ini disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023.

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

➤ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Perhitungan IKLH untuk setiap Kabupaten dilakukan dengan menggunakan formula berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Indeks Kualitas lingkungan Hidup sebagai berikut :

$$IKLH \text{ Kabupaten/Kota} = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

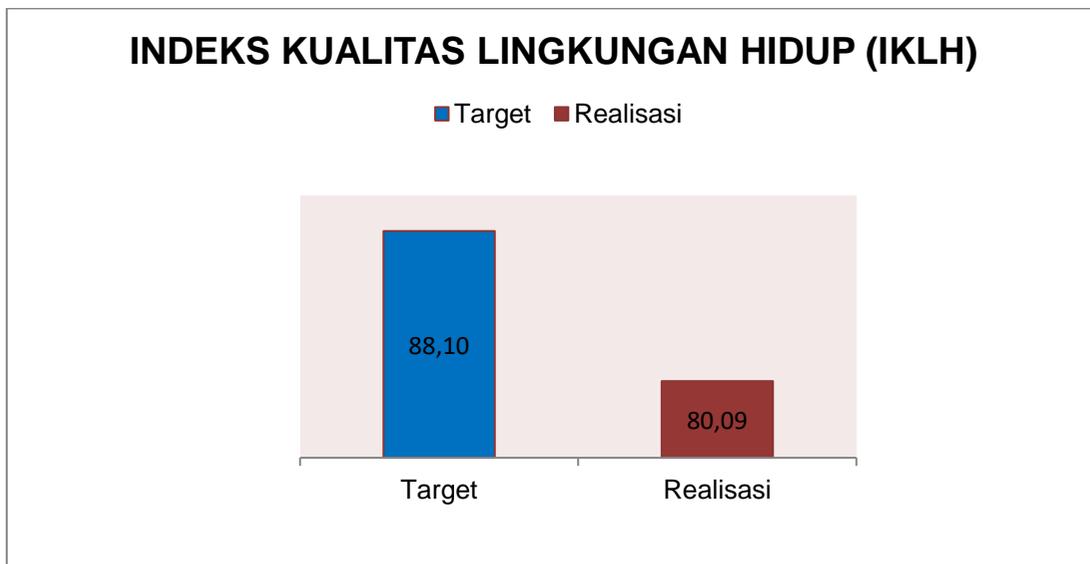
Dimana :

IKLH_Kabupaten = Indeks Kualitas Lingkungan Tingkat Kabupaten

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan



Grafik. 3.5

Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2023

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 yakni 80,09 berada dalam kategori “**BAIK**”. Nilai IKLH tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yakni 79,71. Komponen Indikator yaitu IKU tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebelumnya namun terdapat penurunan nilai IKA dan IKL yang tidak signifikan pada tahun 2023.

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel. 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran 1		Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan				
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	27,5	25,01	90,95%	28	24,92	89,00%
Indeks Kualitas Udara	29,55	38,18	129,20%	29,6	38,87	131,32%
Indeks Tutupan Lahan	30,5	16,52	54,16%	30,5	16,31	53,48%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- Hasil perhitungan IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,92 sedangkan target IKA pada tahun 2023 sebesar 28.00. Nilai IKA yang diperoleh belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan rumus, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan. Perhitungan IKA pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).
- Terdapat peningkatan pada nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai IKU pada tahun 2023 adalah 38,87 yang mengindikasikan kenaikan nilai indeks sekitar 0,69 dari tahun 2022 yang



berkisar 38,18. Nilai tersebut juga melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2023 yakni sekitar 29,60.

- Komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 0,21 dari nilai IKL 16,52 pada tahun 2022 menjadi 16,31 pada tahun 2023. Penurunan nilai indeks ini disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023.
- Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 yakni 80,09 berada dalam kategori “**BAIK**”. Nilai IKLH tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yakni 79,71. Komponen Indikator yaitu IKU tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebelumnya namun terdapat penurunan nilai IKA dan IKL yang tidak signifikan pada tahun 2023.

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2023 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.8

Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

Sasaran 1 Indikator Kinerja Sasaran	Meningkatnya Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan			Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
	Tahun 2022	Tahun 2023	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023		
Indeks Kualitas Air	25,01	24,92	24,96	28,5	114,18%
Indeks Kualitas Udara	38,18	38,87	38,52	29,7	77,10%
Indeks Tutupan Lahan	16,52	16,31	16,41	30,5	185,86%

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Interaksi antara pertumbuhan populasi, kepadatan dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat. Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap Provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta simulasi baik berupa penerapan peraturan dan kebijakan serta pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2020, pencapaian IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH Kabupaten/Kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.

Adapun perbandingan antara target dan capaian nasional dengan target dan capaian Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.9
Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48	72,42	88.10	80.09

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:



- Perubahan aturan mengenai perhitungan IKLH (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang mengatur mengenai perubahan rumus/formulasi, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan.
- Nilai IKA Kabupaten Luwu Timur yang berubah secara signifikan. Perhitungan IKA pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021) sedangkan Target nilai IKA yang ada masih mengacu pada target Renstra yang masih menggunakan perhitungan lama.
- Pengujian Sampel air sungai dan air danau dilakukan di 2 Laboratorium yakni Laboratorium Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan dan Laboratorium di UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sehingga terjadi keterlambatan Hasil Uji Laboratorium atas Parameter Air Sungai dan Danau.
- Keterlambatan pengiriman data hasil pengukuran kualitas udara ambien metode *Passive Sampler* dari Direktorat Pengendalian Pencemaran yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU).
- Sarana dan prasarana pendukung belum lengkap.
- Terbatasnya personil untuk mengelola hasil laporan akhir.



❖ **Dampak terhadap masyarakat**

Dampak dari meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini antara lain:

- Dari hasil pengujian kualitas air, udara dan tutupan lahan dapat diketahui apakah kondisi lingkungan di Kabupaten Luwu Timur masih tergolong baik atau tidak.
- Masyarakat dapat mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dari tahun ke tahun sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar

❖ **Solusi**

- Meningkatkan pengawasan kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan lingkungan yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL.
- Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang baru.
- Memperbaharui data Tutupan Lahan Kabupaten Luwu Timur seperti Ruang Terbuka Hijau maupun Tutupan Vegetasi yang lainnya. Diharapkan pembaharuan data tersebut, sehingga dapat meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Luwu Timur.
- Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah

di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga bisa mempercepat hasil pengujian dan tidak menghambat dalam proses penyusunan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

- Terkait pemenuhan jasa tenaga laboratorium untuk pemeriksaan sampel air sungai dan air laut terdapat efisiensi anggaran untuk selisih biaya analisa setiap parameter yang dianggarkan dengan harga setiap parameter di laboratorium.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam penyampaian informasi maupun pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi tersebut. Dan penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial seperti Instagram Dinas Lingkungan Hidup.
- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	28	24,92	89,00%	101.465.000	95.674.406	94,29%
	Indeks Kualitas Udara	29,6	38,87	131,32%			
	Indeks Tutupan Lahan	30,5	16,31	53,48%			

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup terdapat 9 Program 10 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Adapun penjelasan untuk program-program tersebut yaitu:

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- **Indikator Program** adalah Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan.
- **Formulasi** : *“jumlah sektor kegiatan yang mempengaruhi lingkungan dibagi jumlah kajian perencanaan lingkungan dikali seratus”*.

Target kinerja tahun 2023 adalah 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Capaian tersebut yakni

penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045. Program Perencanaan Lingkungan Hidup didukung oleh 1 kegiatan.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.**

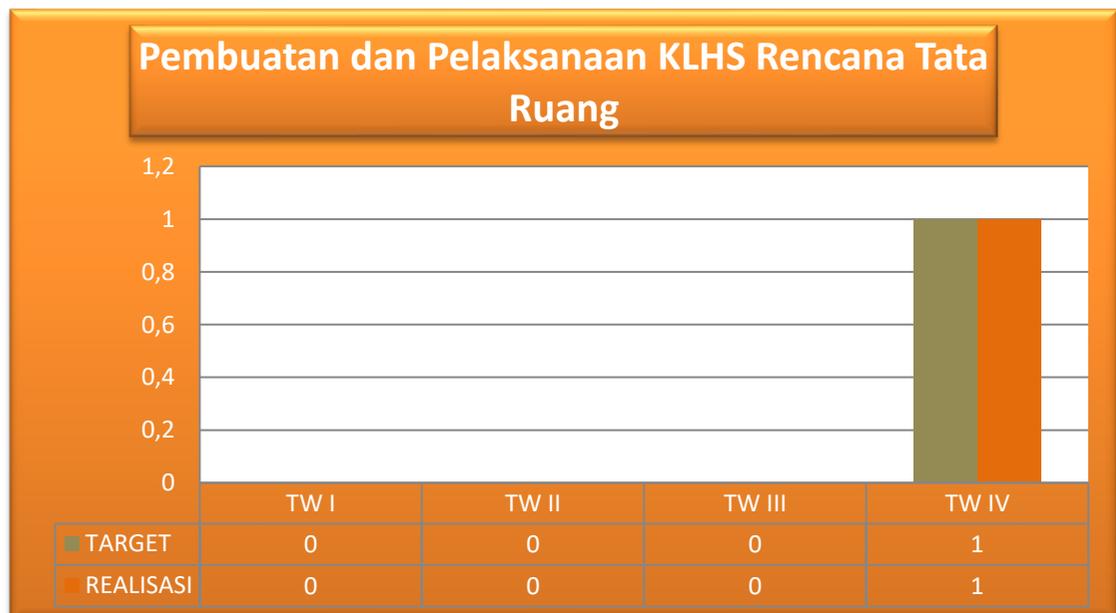
Tabel. 3.11

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
a	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

- **Indikator kegiatan** adalah jumlah dokumen yang dihasilkan. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan

1. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang.



Grafik 3.6
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen KLHS SKPD yang disusun tepat waktu. Target sub kegiatan adalah 1 dokumen dan realisasi target 1 dokumen atau capaian 100% dimana telah dilaksanakan penyusunan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045. Capaian kinerja tercapai 100% karena telah dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran. Target kinerja pada anggaran pokok 2 dokumen yaitu dokumen KLHS RDTR dan KLHS RPJPD, tetapi untuk penyusunan KLHS RDTR tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan RDTR oleh Dinas PUPR tidak dijalankan yang merupakan acuan dalam penyusunan KLHS RDTR, sehingga dilakukan penyesuaian target kinerja saat perubahan anggaran. Adapun realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 97,66 % hal ini karena adanya efisiensi anggaran untuk 1 kali pertemuan karena narasumber tidak datang ke Luwu Timur sehingga pertemuan dilaksanakan secara daring sehingga anggaran untuk sewa gedung pertemuan dan sewa hotel tidak digunakan.

Dokumentasi Kegiatan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2045.



2) Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- **Indikator Program** adalah Persentase perbaikan kualitas air udara dan tutupan lahan.
- **Formulasi** : “Nilai pencemaran tahun sekarang dibagi nilai pencemaran di tahun sebelumnya dikali seratus”.

Target kinerja tahun 2023 adalah 1% dan terealisasi 1.007% dengan persentase capaian kinerja sebesar 101%. Capaian tersebut berasal dari penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH Tahun 2023 adalah 80,09 sedangkan nilai IKLH Tahun 2022 adalah 79,71 sehingga di dapatkan persentase capaian senilai 1,007%. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

- **Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

Tabel. 3.12
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
a	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

b	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176 Laporan	246 Laporan	139,77%
----------	---	---	-------------	-------------	---------

- **Indikator kegiatan:** Tersedianya dokumen lingkungan. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan:

1) **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.**



Grafik 3.7
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

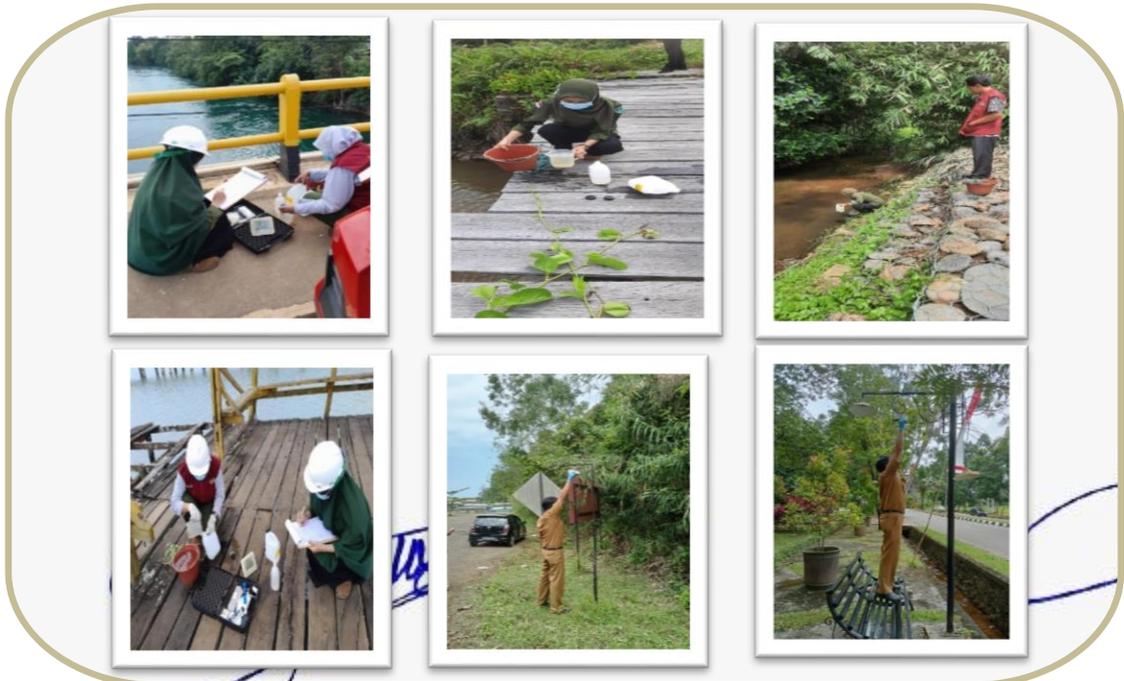
Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan. Pelaksanaan sub kegiatan telah selesai untuk penyusunan 4 dokumen diantaranya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); dokumen indeks kualitas air (IKA), dokumen indeks kualitas udara (IKU) dan dokumen indeks kualitas tutupan lahan (IKL). Sub kegiatan ini kegiatan ini memuat pemantauan kualitas air untuk 8 (delapan) lokasi pemantauan (6 (enam) sungai yaitu : Sungai Lagego, Sungai Tomoni, Sungai Kalaena, Sungai Angkona, Sungai Malili, dan Sungai Wasuponda sungai dan 2 Danau

yaitu Danau Towuti dan Danau Matano). Pemantauan kualitas air dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dan dalam penentuan hasil IKA diambil dari rata-rata hasil pemantauan kualitas air sebanyak 2 kali.

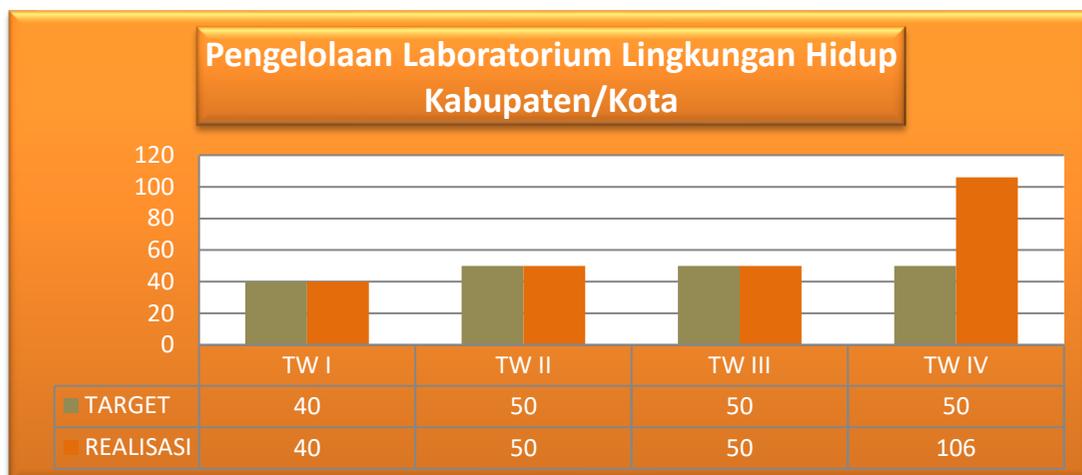
Pengukuran dan pengambilan sampel kualitas udara Ambien (IKU) dengan parameter NO₂ dan SO₂ menggunakan metode *passive sampler* yang dilakukan di 4 titik pantau yakni area perkantoran, pemukiman, transportasi dan industri. Dan pengukuran Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang disajikan dalam bentuk peta yang mencakup luas wilayah, luas hutan, luas belukar dalam kawasan, luas belukar dalam fungsi lindung, ruang terbuka hijau, taman kehati, tutupan vegetasi relevan lainnya.

Adapun realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 94,29 % hal ini karena adanya efisiensi anggaran untuk jasa pemeriksaan laboratorium.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.



2) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



Grafik 3.8
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah melebihi dari target kinerja yaitu 246 laporan hasil uji laboratorium. Hal ini berbanding lurus dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk UPTD Laboratorium dimana target PAD Tahun 2023 sebesar Rp. 40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 68.068.000,- atau persentase capaian sebesar 170.17%. Sub kegiatan ini memuat antara lain, Pengambilan sampel, Pengujian Sampel dan Penyampaian Laporan Hasil Uji.

Adapun realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 80,35 % hal ini karena adanya sisa biaya transportasi darat, transportasi udara dan akomodasi asesor yang dianggarkan 3 orang tetapi asesor yang datang hanya 2 orang; Penyediaan anggaran untuk pemeliharaan AAS dan UV-VIS di anggaran perubahan, sementara alat/spare part masih dipesan dengan estimasi 2 bulan pemesanan (Januari 2024) sehingga anggaran tidak bisa digunakan; sisa gaji upah jasa tenaga laboratorium yang resign; jasa konsultan untuk labling dan perluasan ruang lingkup tidak dilaksanakan

karena terkendala dengan jadwal konsultan yang sangat padat di akhir tahun; terdapat sisa anggaran atas negosiasi atas belanja water bath, Ph meter, SICHI disk, GPS, Heating blok, safety shower dan belanja modal peralatan sampling tidak terealisasi karena tidak tersedia di e-catalog.

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota



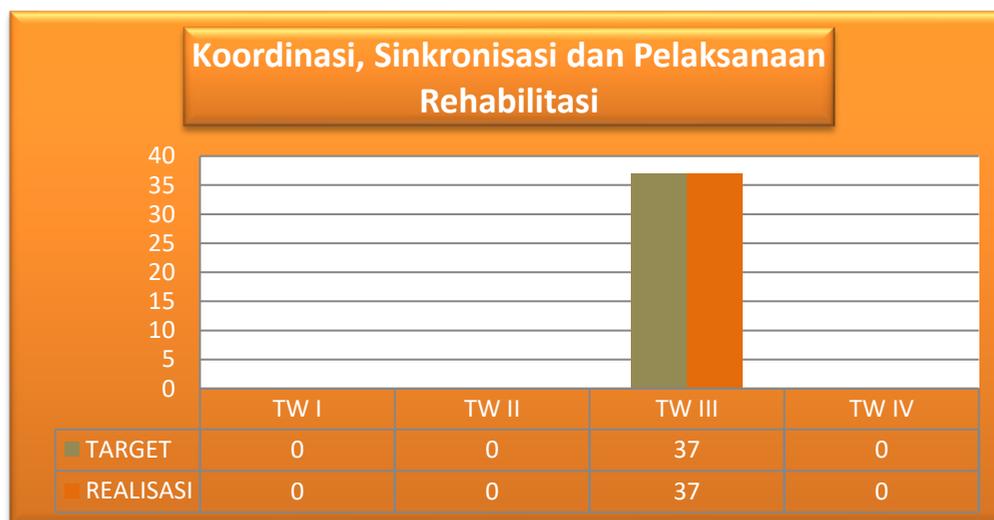
➤ **Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota**

Tabel. 3.13
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	37 Ha	100%
A	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan yang direncanakan untuk direhabilitasi	37 Ha	37 Ha	100%

- **Indikator kegiatan:** Luas lahan yang direhabilitasi. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan.

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi



Grafik 3.9
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Luas lahan yang direncanakan untuk direhabilitasi. Pelaksanaa sub kegiatan telah dilaksanakan untuk rehabilitasi lahan seluas 37 Ha di Kawasan IPPKH bertempat di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Sub kegiatan ini memuat antara lain pemantauan dan evaluasi hasil penanaman pohon pada areal IPPKH Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai di Desa Pekaloa Kec. Towuti.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi



3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- **Indikator Program** adalah Persentase RTH yang tertangani dengan baik.
- **Formulasi** : “Jumlah RTH yang ditangani di bagi total jumlah RTH dikali seratus”.

Target kinerja tahun 2023 adalah 5 RTH dan terealisasi 5 RTH dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

➤ Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

Tabel. 3.14

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah RTH yang dipelihara	5 RTH	5 RTH	100%
A	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah RTH yang dipelihara	5 RTH	5 RTH	100%

Indikator kegiatan: Jumlah RTH yang dipelihara. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan.

1) Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.



Grafik 3.10 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah RTH yang dipelihara. Pelaksanaan sub kegiatan RTH telah terlaksana untuk pemeliharaan 5 RTH. Adapun Ruang Terbuka Hijau yang telah dilakukan pemeliharaan diantaranya: Median Jalan; Tugu Adipura, Taman Lapangan Merdeka; Taman Sayang 1 dan Taman Sayang 2.

Adapun realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 91,77 % hal ini karena adanya belanja honorarium pengawasan dan honorarium perencanaan atas penataan taman sayang 1 yang tidak terbayarkan karena tidak memiliki regulasi untuk pembayaran dan sisa gaji upah jasa selama 5 bulan karena resign.

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.



4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- **Indikator Program** adalah Persentase penghasil limbah B3 yang diawasi.
- **Formulasi** : “jumlah pemilik ijin LB3 yang diawasi dibagi dengan jumlah pemilik izin LB3 dikali seratus”.

Target kinerja tahun 2023 adalah 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) oleh 1 kegiatan yaitu:

➤ **Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3**

➤ **Tabel. 3.15**

➤ **Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Usaha yang taat pengelolaan limbah B3	30 Usaha	31 Usaha	103,33 %
a	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah penghasil Limbah B3 yang diawasi	40 Usaha	40 Usaha	100%

Indikator kegiatan: Usaha yang taat pengelolaan limbah B3. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan.

- 1) **Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.**



Grafik 3.11

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah penghasil Limbah B3 yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan telah memenuhi target kinerja untuk melakukan pengawasan terhadap 40 usaha penghasil Limbah B3 di Kabupaten luwu Timur yang telah memiliki ijin pengelolaan Limbah B3 untuk penyimpanan Limbah B3. Sub kegiatan ini memuat antara lain Kegiatan pemeliharaan taman seperti penataan taman, pembersihan taman, pemeliharaan sarana dan lain-lainnya. Adapun realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 99,76%.

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.



5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- **Indikator Program** adalah Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan.

- **Formulasi** : “jumlah usaha/kegiatan yang taat dibagi jumlah pemilik izin lingkungan yang dibina dan diawasi dikali seratus”.

Target kinerja tahun 2023 adalah 50% dan terealisasi 40 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 80%. Dimana terdapat 22 usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan terhadap 55 usaha/kegiatan yang diawasi. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) oleh 1 kegiatan yaitu:

- **Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota**

➤ **Tabel. 3.16**

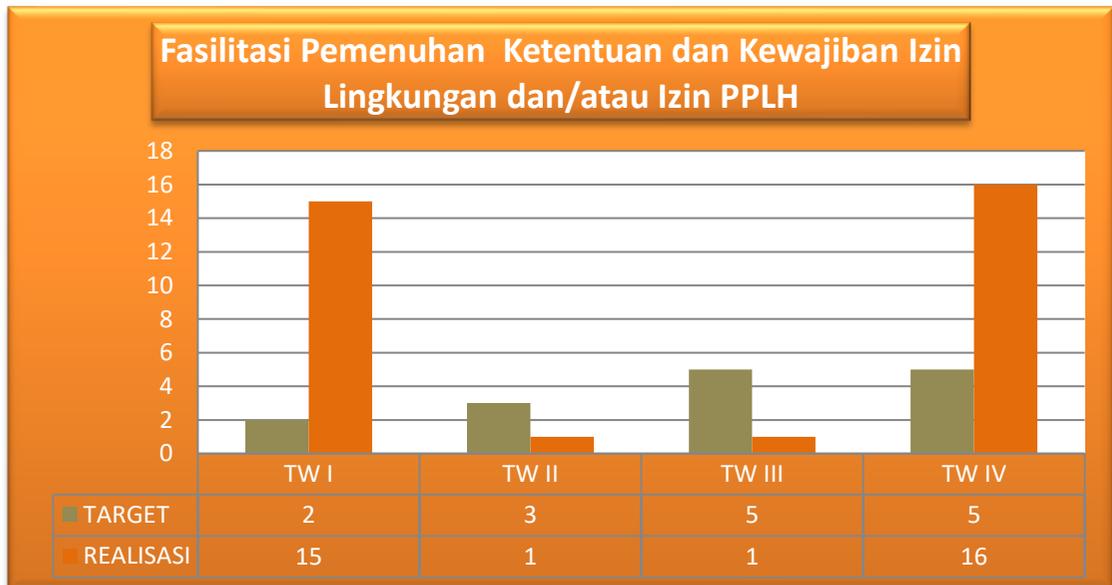
➤ **Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	22 Usaha/ Kegiatan	22 Usaha/ Kegiatan	100%
a	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi	15 Usaha/ Kegiatan	33 Usaha/ Kegiatan	220%
b	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	35 Usaha/ Kegiatan	55 Usaha/ Kegiatan	123,33%
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi	2 Usaha/ Kegiatan	0 Usaha/ Kegiatan	0%

Indikator kegiatan: Jumlah usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan.



1) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH.



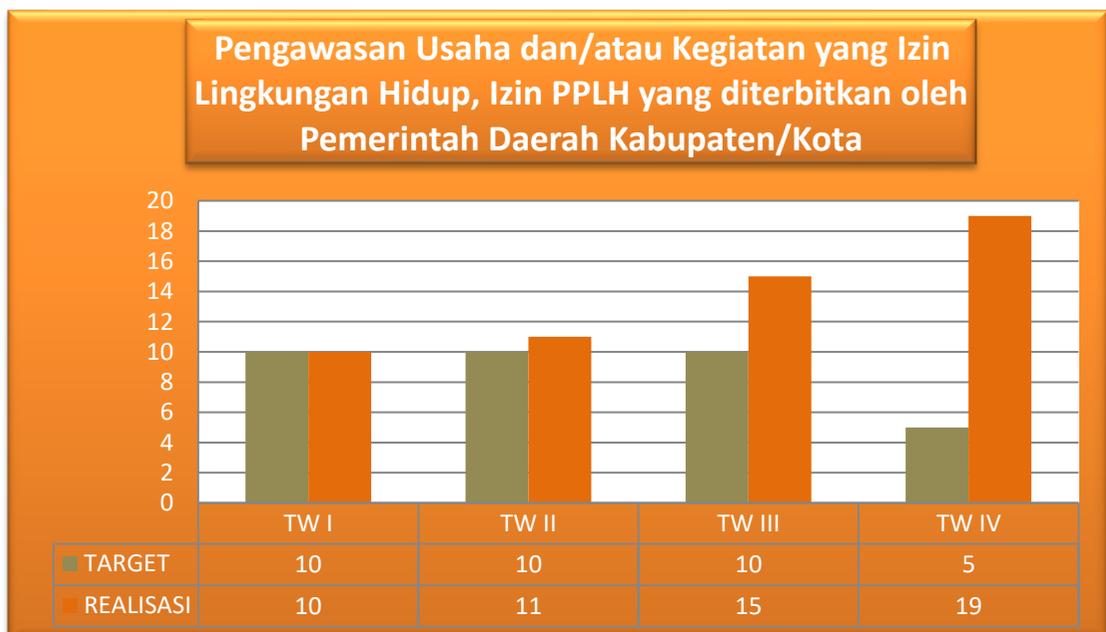
Grafik 3.12
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

- **Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja yaitu 33 usaha/kegiatan atau capaian 220%. Untuk Tahun 2023 telah memfasilitasi 33 persetujuan ijin lingkungan. Adapun realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 99,07%.

Dokumentasi Kegiatan Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH.



2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota.



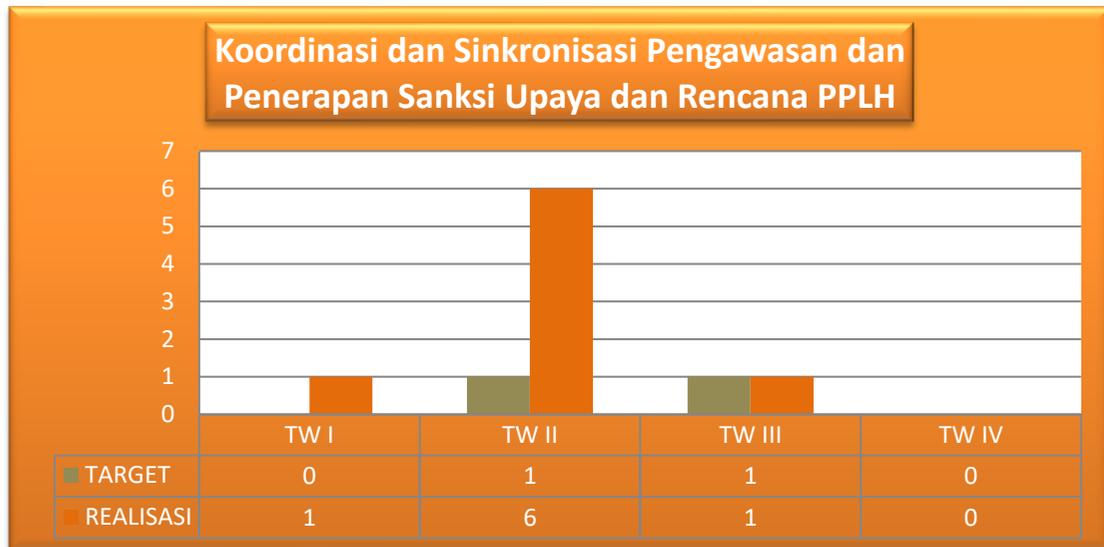
Grafik 3.13
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja untuk pengawasan terhadap 55 usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan. Adapun realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 98,17 % hal ini karena adanya belanja jasa tenagapupah jasa yang tidak terbayarkan selama 2 bulan karena lulus sebagai tenaga PPPK. Honorarium pengawasan dan honorarium perencanaan atas penataan taman sayang 1 yang tidak terbayarkan karena tidak memiliki regulasi.

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota.



3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.



Grafik 3.14
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi. Pelaksanaan sub kegiatan ini memiliki target 2 usaha/kegiatan dan realisasi nihil karena tidak ada pelaku usaha/kegiatan yang diberi sanksi. Dinas Lingkungan Hidup masih dalam tahap pendampingan dan pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan dan kewenangan pemberian sanksi untuk sebagian besar sektor usaha/kegiatan menjadi kewenangan Provinsi. Adapun realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 98,17%.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.



6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

- **Indikator Program** adalah Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisonal.
- **Formulasi** : *“Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisonal yang di verifikasi”.*

Target kinerja tahun 2023 adalah 3 MHA dan terealisasi 0 dokumen terkait PPMHA dengan persentase capaian kinerja sebesar 0%. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

➤ Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Tabel. 3.17
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terdata	2 MHA	0 MHA	0%
A	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah data/Dokumen terkait PPMHA	3 MHA	3 MA	100%

Indikator kegiatan: Jumlah MHA yang terdata. Adapun target 2 MHA yang terdata dan realiasi 0 MHA yang terdata

4) **Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.**



Grafik 3.15
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah data/dokumen terkait PPMHA. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilaksanakan dan telah memenuhi target untuk 3 dokumen MHA diantaranya: Pembinaan Masyarakat Adat Tanah Ongko; Pembinaan Masyarakat Adat Matano; Pembinaan Masyarakat Adat Cerekang. Adapun realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 99,06%.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.



7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- **Indikator Program** adalah Persentase penghargaan lingkungan yang diterima.
- **Formulasi** : *“jumlah penghargaan yang diterima dibagi total jumlah penghargaan yang diikuti dikali seratus”*.

Target kinerja tahun 2023 adalah 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Dimana terdapat 2 penghargaan yang diterima

terhadap 2 penghargaan yang diikuti yakni Adiwiyata dan Proklamasi. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

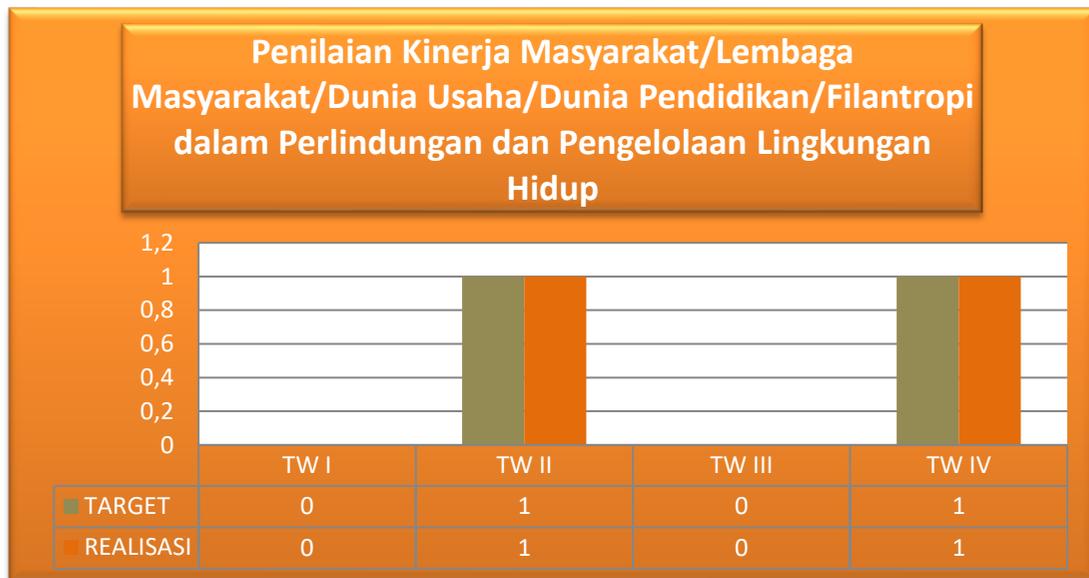
- **Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

Tabel. 3.18
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penghargaan yang diberikan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	100%
a	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan yang diberikan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	100%

Indikator kegiatan: Jumlah penghargaan yang diberikan. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan.

- 1) **Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**



Grafik 3.16
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah penghargaan yang diberikan, target pada triwulan IV sebanyak 2 penghargaan dan telah terealisasi 2 penghargaan (dari kegiatan Adiwiyata Sekolah dan Program Kampung Iklim), dimana penghargaan tersebut untuk sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 2 sekolah (UPT SP SMPN 1 Tomoni dan UPT SP SDN 221 Malili), Adiwiyata Provinsi sebanyak 38 sekolah, Adiwiyata Kabupaten sebanyak 35 sekolah yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu juga sub kegiatan ini di dukung dengan pertemuan dan koordinasi antara sekolah-sekolah dan Tim Pembina berupa rapat koordinasi, pembinaan dan verifikasi sebanyak 20 pertemuan.

Selain Penghargaan Adiwiyata yang diterima oleh sekolah di Kabupaten Luwu Timur, terdapat juga 1 penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu Penghargaan kategori Pendukung Proklamasi yang diserahkan oleh Menteri LHK. Penghargaan Proklamasi untuk tahun 2023 sebanyak 8 Desa (1 Proklamasi utama, 2 madya dan 5 pratama). Adapun realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 96,74%.

Dokumentasi Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



8) Program Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- **Indikator Program** adalah Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan.
- **Formulasi** : *"jumlah aduan lingkungan dibagi jumlah aduan lingkungan yang diselesaikan dikali seratus"*.

Target kinerja tahun 2023 adalah 50% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 200%. Dimana terdapat 8 jumlah aduan dan diselesaikan sebanyak 8 aduan dengan persentase capaian kinerja 200%. Program Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota didukung oleh 1 kegiatan.

- **Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota**

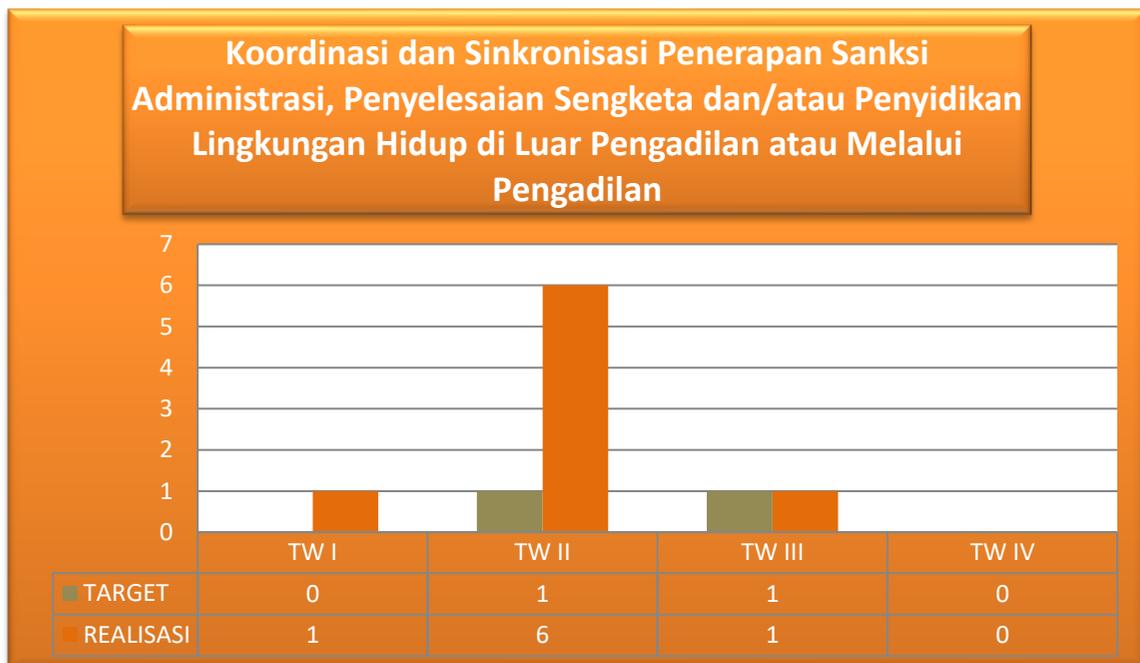


Tabel. 3.19
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	8 Masalah	400%
	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	8 Masalah	400%

Indikator kegiatan: Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan.

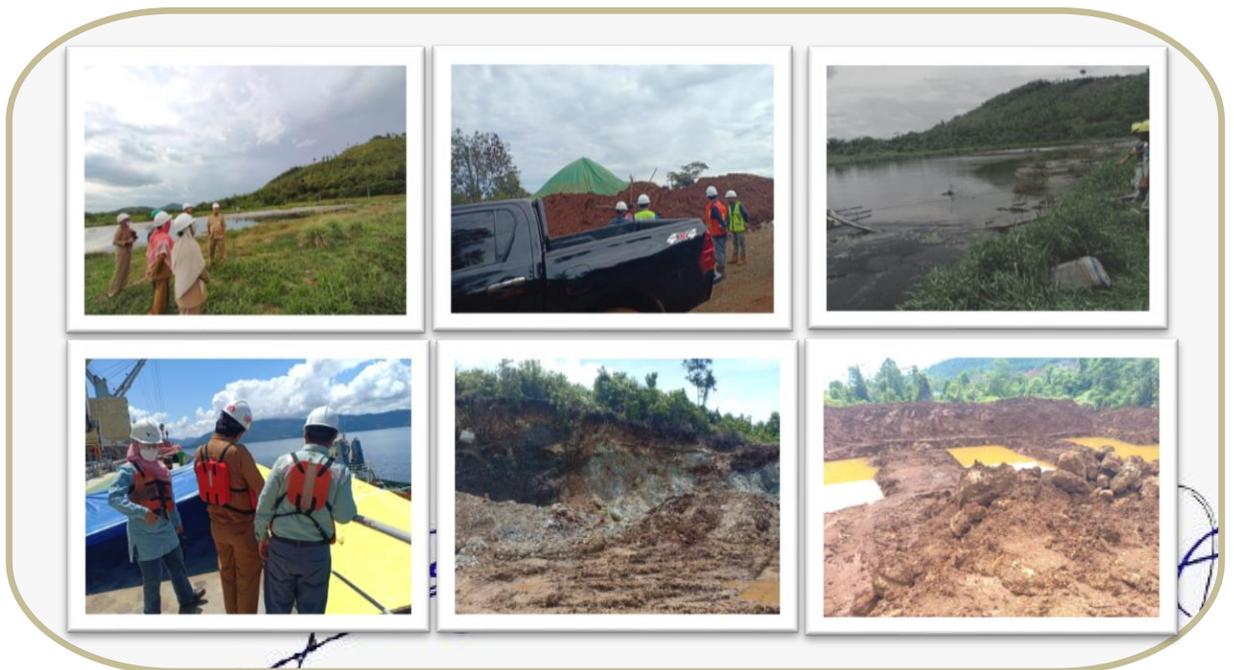
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.



Grafik 13
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilaksanakan dan telah melebihi target kinerja Tahun 2023. Terdapat 8 masalah lingkungan yang diselesaikan atas 8 jenis aduan masalah. Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 75,28%. Adapun penyediaan anggaran di sub kegiatan ini bersifat di sediakan seperti anggaran makan minum rapat, jasa tenaga laboratorium dan biaya perjalanan dinas masih yang masih tersisa.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.



9) Program Pengelolaan Persampahan

- **Indikator Program** adalah Persentase jumlah sampah yang tertangani.
- **Formulasi** : *“jumlah sampah yang tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali seratus”*.

Target kinerja tahun 2023 adalah 70% dan terealisasi 70.56% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100.8%. Dimana jumlah sampah yang tertangani sebanyak 6.901,89 + 24.571,80 ton terhadap jumlah timbulan sampah sebanyak 44.606,07 ton $\times 100 = 70,56\%$. Program Pengelolaan Persampahan didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

➤ **Kegiatan Pengelolaan Sampah**

Tabel. 3.20
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola	70%	70.56%	100.8%
a	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani	22.575 Ton	22.575 Ton	100%
b	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	100%
C	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina	127 Bank sampah	76 Bank sampah	60%

Indikator kegiatan: Persentase sampah yang dikelola. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan.

- 1) **Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.**



Grafik 3.17
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sampah yang ditangani. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilaksanakan dan telah memenuhi target kinerja Tahun 2023. Jumlah sampah yang tertangani sebanyak 22.575 ton. Adapun Lokasi pengangkutan sampah untuk dibawa ke TPA Ussu diantaranya: Kelurahan Malili; Desa Puncak Indah; Desa Ussu; Desa Baruga dan Desa Balintang. Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 92,28%. Hal ini karena adanya sisa anggaran BBM terlalu besar yang dianggarkan di anggaran perubahan karena masih mengakomodir jumlah penambahan BBM dari Januari 2024 sesuai jumlah yang ada di nota dinas; terdapat sisa anggaran juga untuk penyediaan anggaran pemeliharaan roda enam untuk 16 unit termasuk yang di kecamatan tetapi kendaraan yang ada di kecamatan hanya rusak ringan sehingga tidak memerlukan banyak anggaran pemeliharaan; Kondisi roda tiga sebagian masih kondisi baru dan sebagian mengalami rusak sehingga tidak memerlukan banyak anggaran pemeliharaan; dan sisa gaji tenaga kebersihan yang resign.

Dokumentasi Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.



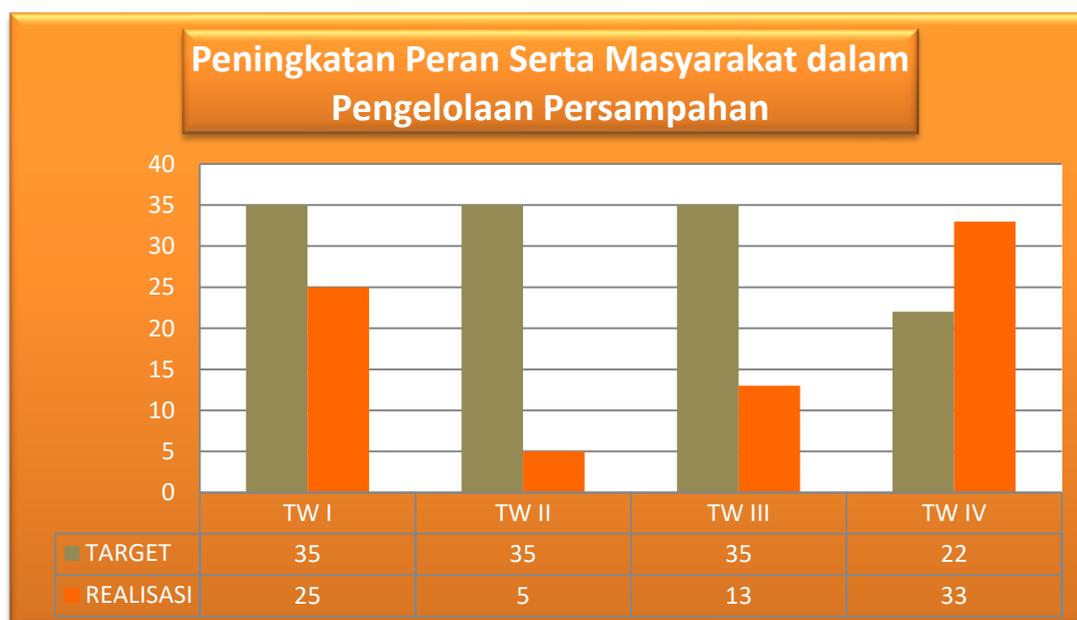
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.



Grafik 3.18
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja dimana telah melakukan pengadaan untuk 12 jenis sarana dan prasarana persampahan. Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 94,54%. Hal ini karena adanya sisa anggaran untuk honorarium pengawasan dan honorarium perencanaan untuk pembangunan bangunan penampung sampah yang tidak terbayarkan karena tidak memiliki regulasi untuk pembayaran.

3) **Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.**



Grafik 3.19

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah bank sampah yang dibina. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana tetapi tidak memenuhi target kinerja dimana target kinerja pembinaan terhadap 127 bank sampah di Kabupaten Luwu Timur tetapi realisasi hanya 76 bank sampah yang tersebar

di Kelurahan dan desa-desa di Kab. Luwu Timur. Hal-hal yang mempengaruhi target kinerja tidak tercapai salah satunya adalah Banyaknya bank sampah yang tutup karena kalah dengan persaingan harga dengan sektor informal dan jarak vendor yang terlalu jauh sehingga biaya transportasi melonjak. Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 99,76 %.

Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.



SASARAN STRATEGIS 2 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “**Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah**” tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.21
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	60,57	79,50	131,25%

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

- **Indikator kinerja sasaran penunjang** adalah Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah.
- **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “*Jumlah realisasi kinerja dibagi target kinerja dikali seratus*”.

Target Indikator sasaran penunjang Tahun 2023 adalah 60.57% dan realisasi 79,50 % dengan persentase capaian kinerja 131,26 %.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :



I. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran 1 Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	60,56	68,40	112,94%	60,57	79,5	131,25%

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel.3.23

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023		
Nilai SAKIP	68,40	79,5	73,95	70	94,66%

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 3.24

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	100%
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	100%
c	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	100%

d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang termanfaatkan	100%	100%	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	25 orang	24 orang	100%
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 dokumen	18 dokumen	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada perangkat daerah yang ditatausahakan	100%	100%	100%
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	45 stel	45 stel	100%
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 laporan	12 laporan	100%
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 orang	9 orang	112,5%

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	4 jenis	100%
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis	100%
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	100%
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	36 eksampler	36 eksampler	100%
e	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	196 kali	196 kali	100%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	268 kali	268 kali	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000 surat	1000 surat	100%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 rekening	36 rekening	100%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 orang	4 orang	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%



a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	9 unit	100%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 unit	32 unit	100%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- b. Terdapat Jabatan administrasi yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- c. Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- d. Keterlambatan proses administrasi keuangan
- e. Keterbatasan personil pengelola kegiatan/sub kegiatan

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- f. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa



- g. Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
- h. Percepatan proses administrasi keuangan
- i. Melakukan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan pada perubahan anggaran
- j. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- k. Mencermati sub kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
- l. Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai

6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung DLH, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- b. Efisiensi biaya internet kantor yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo

❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Terdapat jabatan administrasi yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 3.25

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	60,57	79,5	131,25%	4.117.729.856	3.998.901.744	97,11%
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	99,90	99,90%	4.117.729.856	3.998.901.744	97,11%

Tabel. 3.26

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	131,25%	94,02 %	5,98%

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 131.25% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94.02%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 5,98 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} [x 100\%]$$



7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan

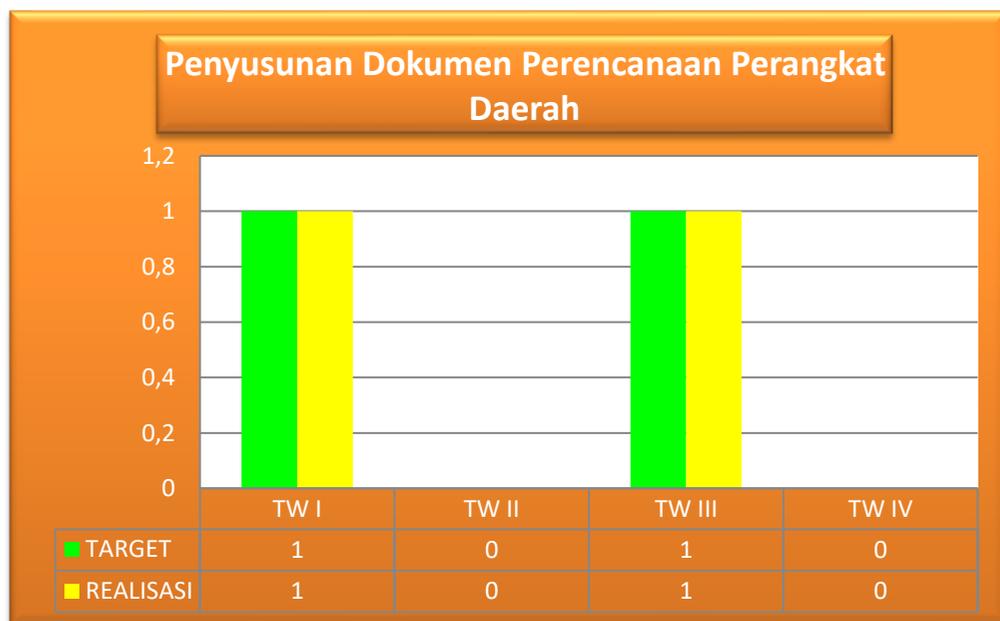
formulasi : *jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus.*

Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



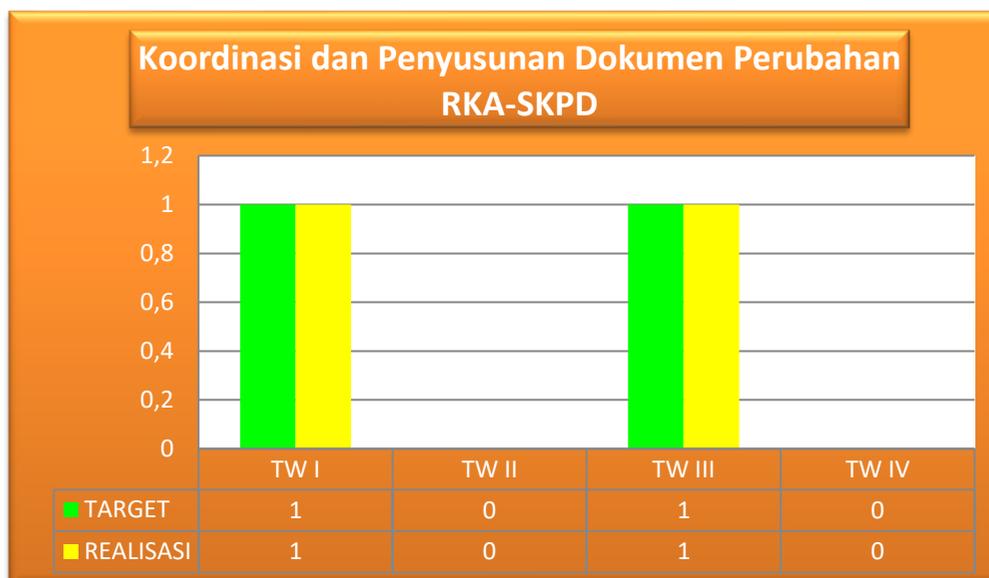
Grafik 3.20

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target s.d triwulan IV sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen Renja Tahun 2023 dan Renja Perubahan tahun 2023 dengan capaian kinerja 100%.

Disediakan anggaran sebesar Rp 50.315.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 46.300.020 (92,02%). Terdapat sisa anggaran untuk honorarium perencana, dan perjalanan dinas.

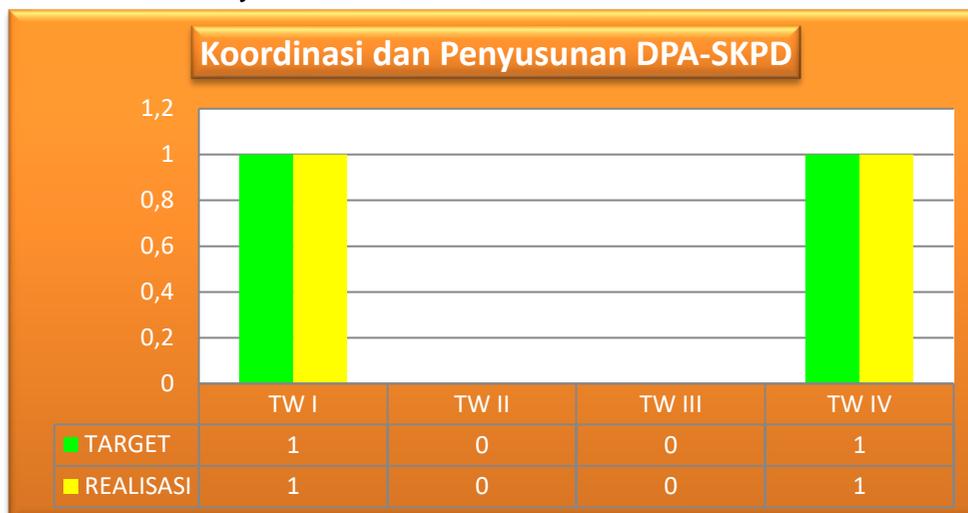
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



Grafik 3.21
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target s.d triwulan IV sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen RKA Pokok 2024 dan RKA Perubahan 2023 dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 3.516.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.409.620,- (96,96%).

c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

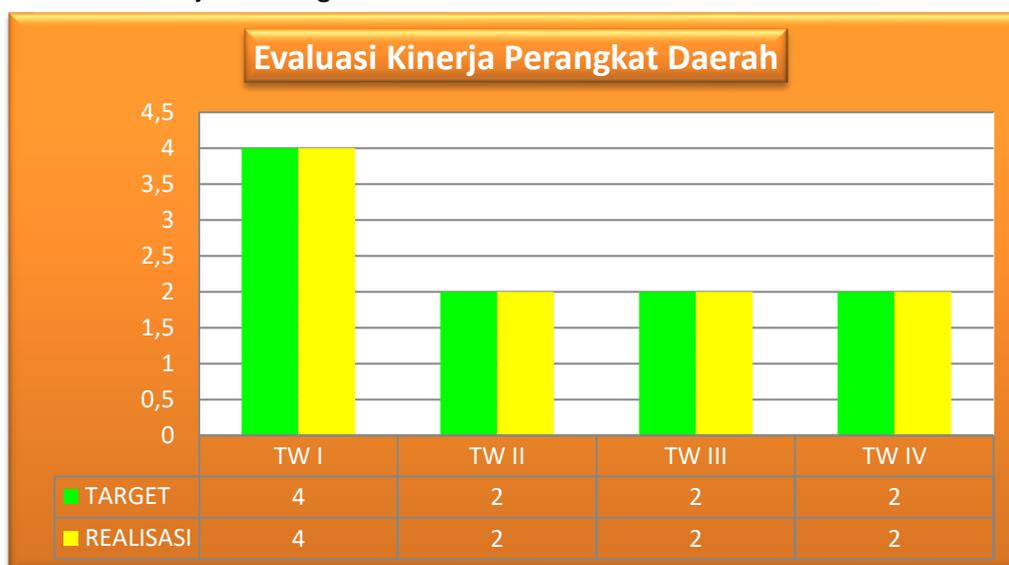


Grafik 3.22

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target s.d triwulan IV sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yaitu tersusunnya dokumen DPA Pokok Tahun 2023 dan dokumen DPA Perubahan Tahun 2023 dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 1.298.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.103.000,- (84,98%).

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Grafik 3.23

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

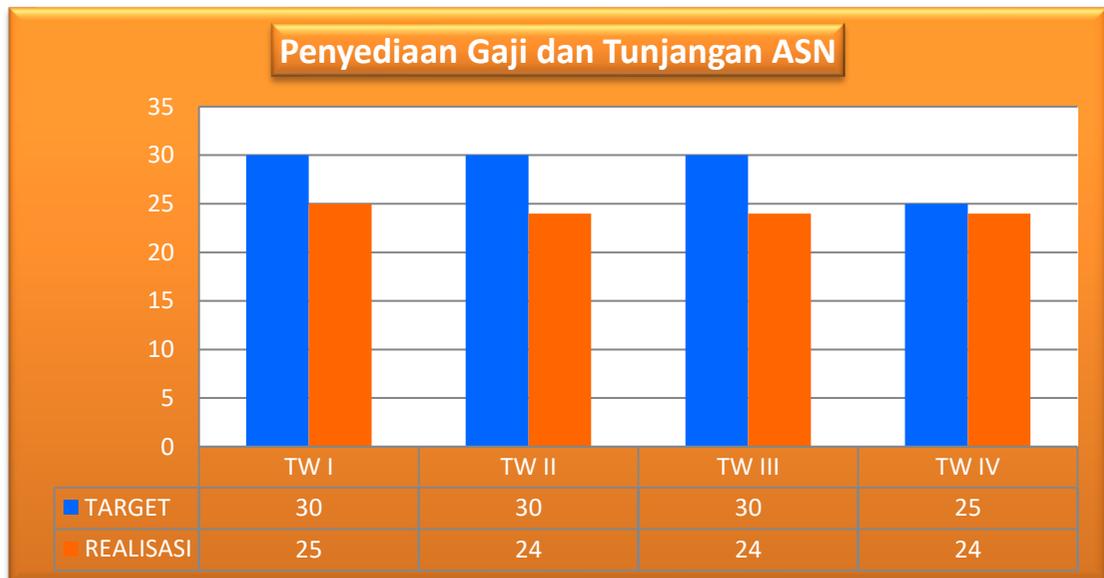
Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target s.d triwulan IV sebanyak 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen yaitu tersusunnya 10 dokumen evaluasi kinerja yaitu dokumen LKPJ, dokumen LKPP, Laporan monitoring dan Evaluasi kinerja Triwulan 1 s/d Triwulan IV T.A. 2023. dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 85.213.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 82.740.600,- (97,10%). Terdapat sisa anggaran untuk perjalanan dinas.

Dokumentasi Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

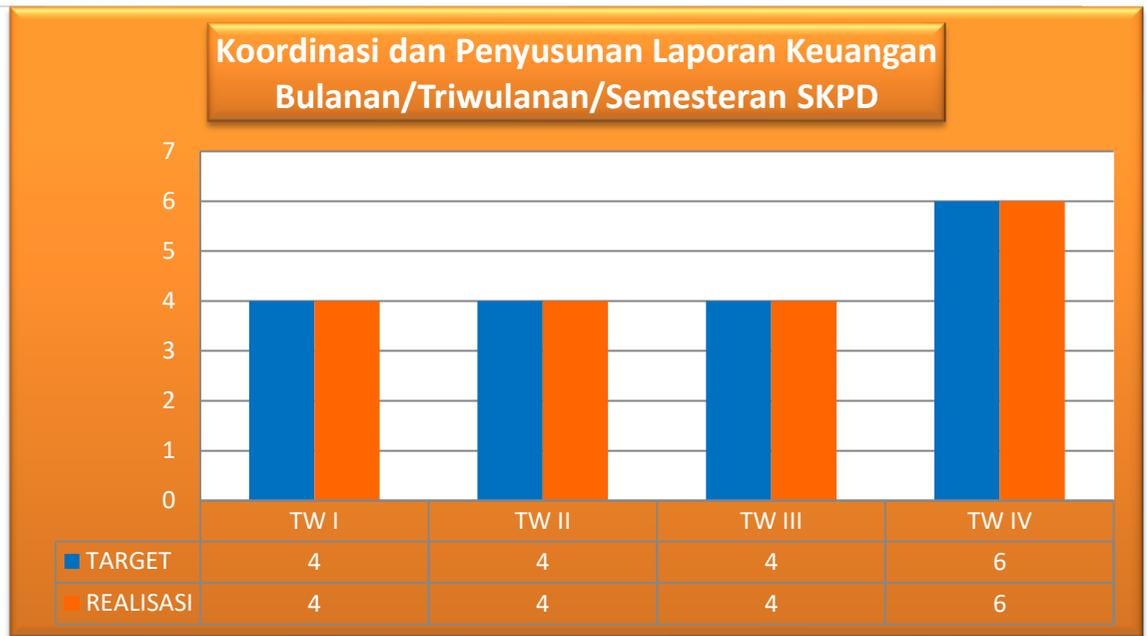
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



Grafik 3.24
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan, dengan target sebanyak 25 orang dan terealisasi 24 orang dengan capaian kinerja 96%. Disediakan anggaran sebesar Rp 2.779.866.192,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.734.599.095,- (98,37%). Terdapat sisa anggaran karena adanya mutasi pegawai setelah penyusunan anggaran perubahan sehingga anggaran gaji tidak dapat disesuaikan kembali.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD

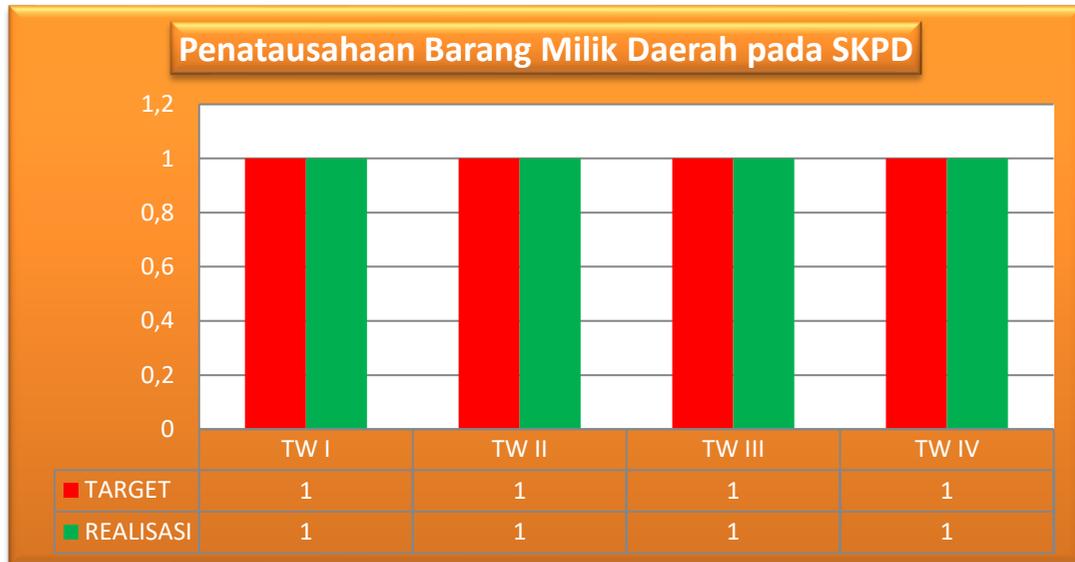


Grafik 3.25
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 18 dokumen dan terealisasi 18 dokumen yaitu tersusunya Laporan Realisasi Keuangan Bulan Januari s/d Desember 2023; Laporan Keuangan Triwulan IV; Laporan Semester II Tahun 2023; dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 91.230.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 90.947.190,- (99,69%).

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD



Grafik 3.26
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen yaitu tersusunnya laporan penatausahaan BMD triwulan I s/d Triwulan IV dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 27.095.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 25.477.380,- (94,03%).

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



Grafik 3.27
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

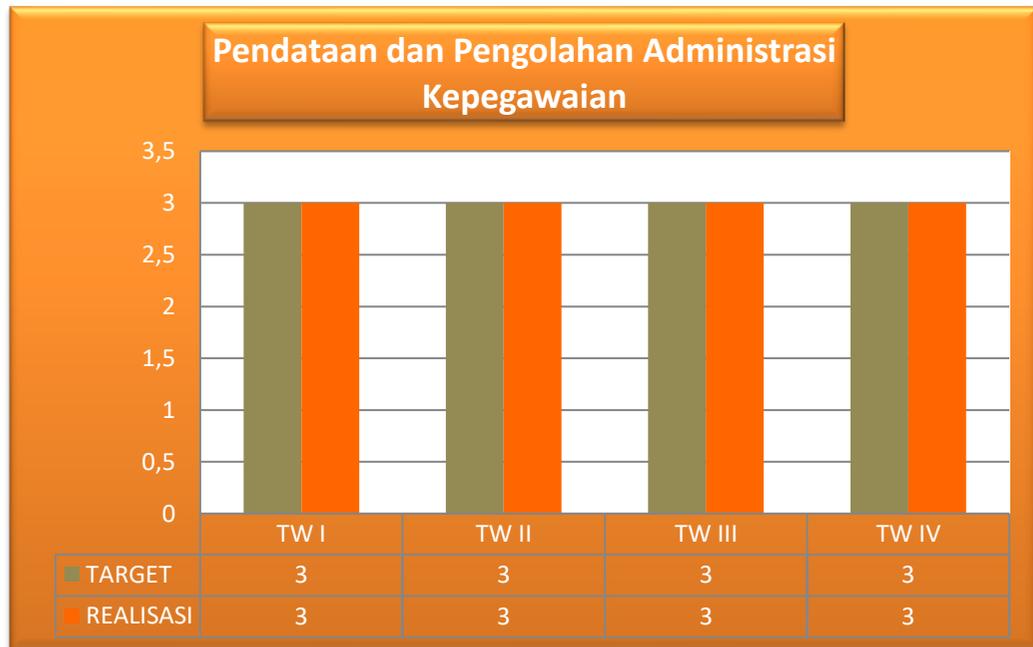
Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, dengan target sebanyak 45 stel dan terealisasi 45 stel dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 29.250.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 29.250.000,- (100%).

Dokumentasi Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya





b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

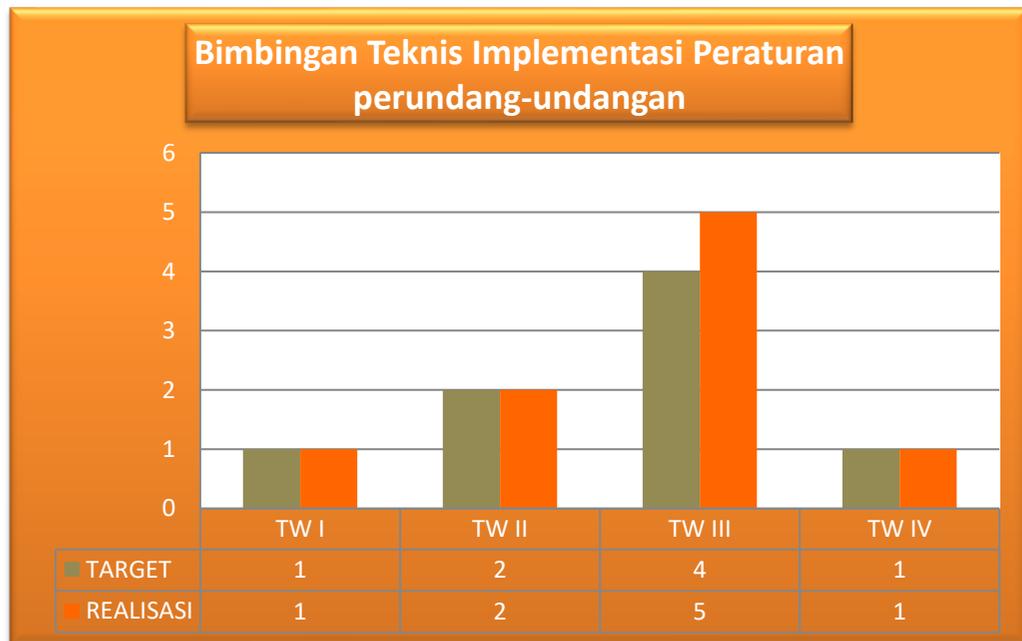


Grafik 3.28
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan, dengan target sebanyak 12 orang dan terealisasi 12 orang yaitu dengan tersusunnya Karsi/Karsu; SKP Tahun 2022; Perjanjian Kinerja Pegawai Tahun 2023; Standar Kompetensi Jabatan; Usulan Kenaikan Pangkat; Usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai; Memperbaharui KP4 Pegawai; Melengkapi pemetaan jabatan pegawai; Mengusulkan cuti pegawai di aplikasi Siyanti; Mengusulkan nama-nama pegawai untuk pencantuman gelar dan perpanjangan kontrak kerja tenaga upah jasa; Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja untuk penginputan SKP Tahun 2023; Mengecek kelengkapan Simpeg pegawai, dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 33.176.540,- dengan realisasi keuangan Rp. 32,690.010,- (98,53%).



c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



Grafik 3.29
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, dengan target sebanyak 8 orang dan terealisasi 9 orang. Adapun Bimtek yang diikuti yaitu Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ); Bimtek penyusunan RPJPD; Bimtek PAD; Bimtek PPID (2org); Bimtek BMD; Latpim (2org); dan Bimtek penyediaan data dan informasi kerentanan dan resiko perubahan iklim, dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 71.020.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 62.476.500,- (87,97%). Terdapat sisa anggaran pada biaya kursus singkat/pelatihan karena anggaran bersifat disediakan apabila ada kegiatan bimtek yang harus membayar kontribusi bimtek.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

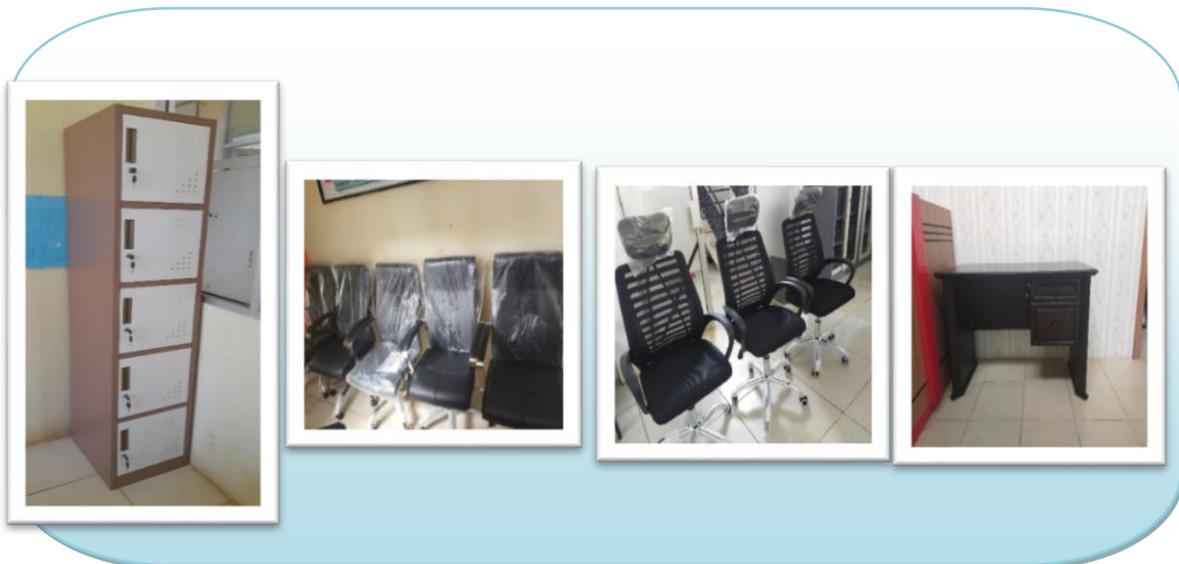
a. Pengadaan mebel



Grafik 3.30
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Mebel yang disediakan, dengan target sebanyak 27 unit dan terealisasi 27 Unit dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 51.750.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 46.650.000,- (90,14%). Terdapat sisa anggaran pada belanja mebel karena menyesuaikan harga hasil negosiasi bersama pihak ketiga.

Dokumentasi Sub Kegiatan Pengadaan Meubel



b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Grafik 3.31
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan, dengan target sebanyak 16 unit dan terealisasi 16 Unit dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 149.990.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 145.729.000,- (97,16%). Terdapat sisa anggaran pada belanja beberapa peralatan dan mesin karena menyesuaikan harga hasil negosiasi bersama pihak ketiga.

Dokumentasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya





5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

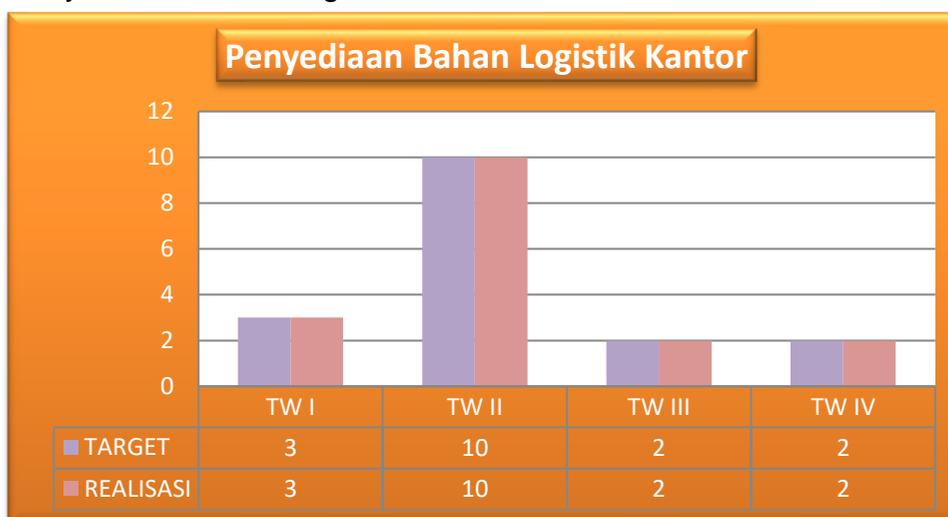
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Grafik 3.32
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, dengan target sebanyak 4 unit dan terealisasi 4 Unit dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.325.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.720.000,- (90,43%).

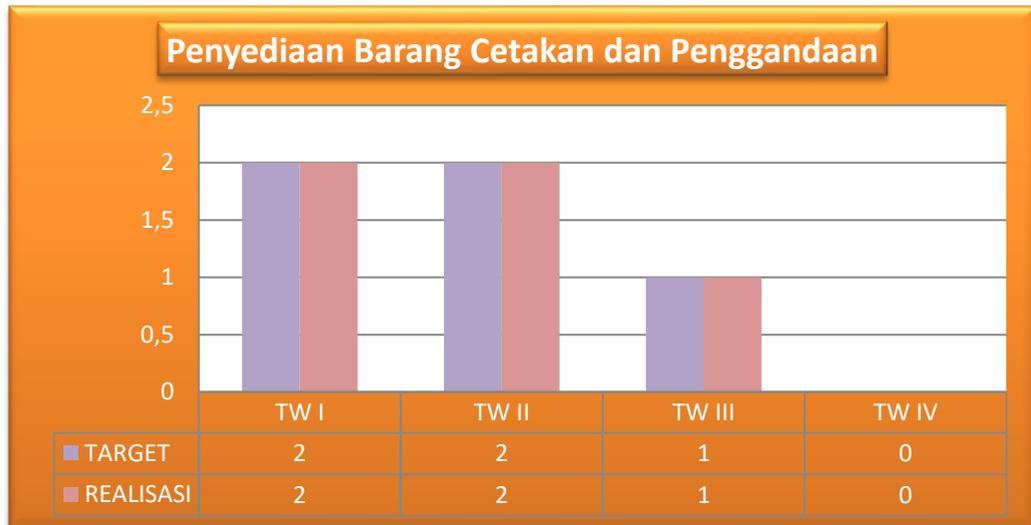
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Grafik 3.33
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan, dengan target sebanyak 17 unit dan terealisasi 17 Unit dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.168.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.166.000,- (99,95%).

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

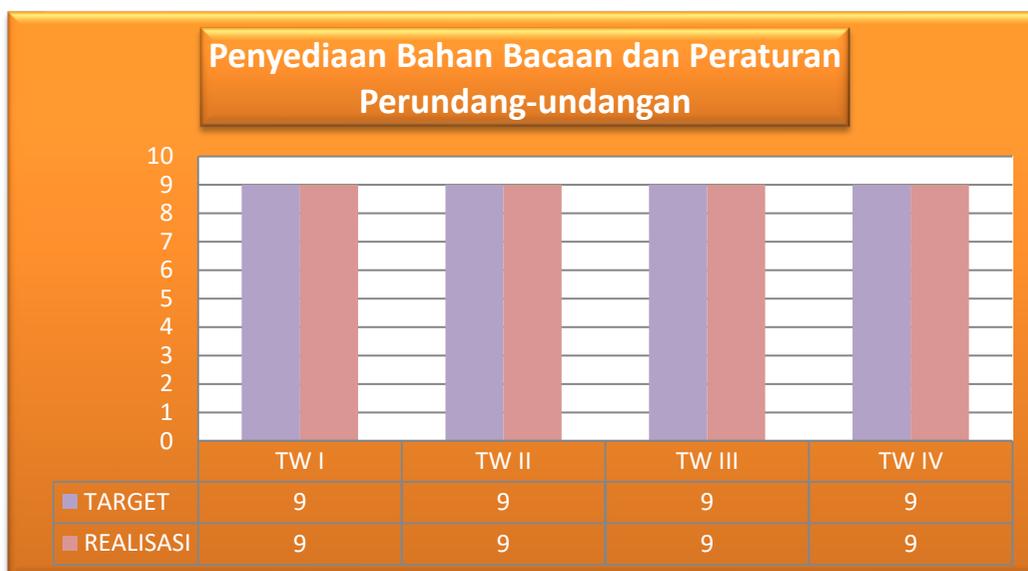


Grafik 3.34
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan, dengan target sebanyak 5 jenis dan terealisasi 5 jenis dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.290.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.766.700,- (87,80%).



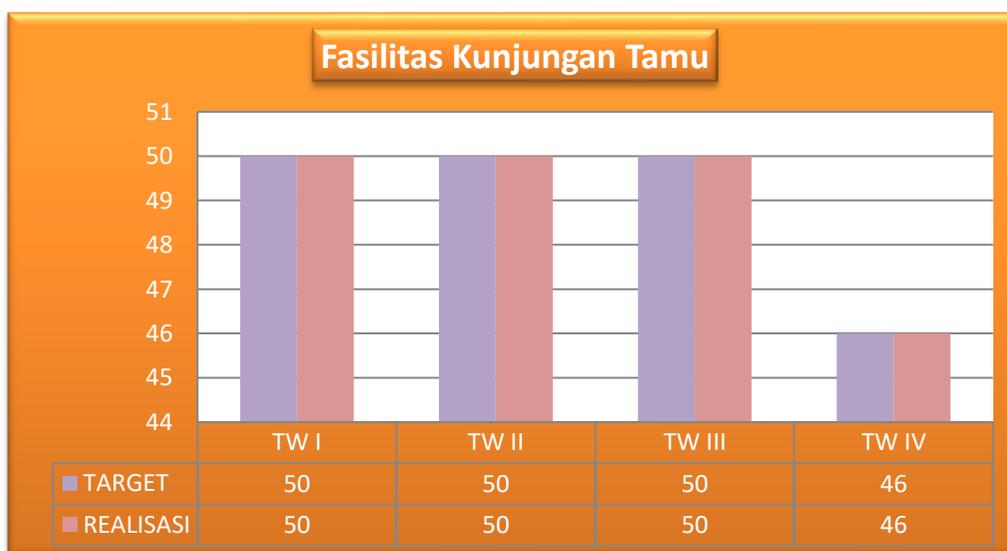
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



Grafik 3.35
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan, dengan target sebanyak 36 eksampler dan terealisasi 36 eksampler dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.900.000,- (86,67%).

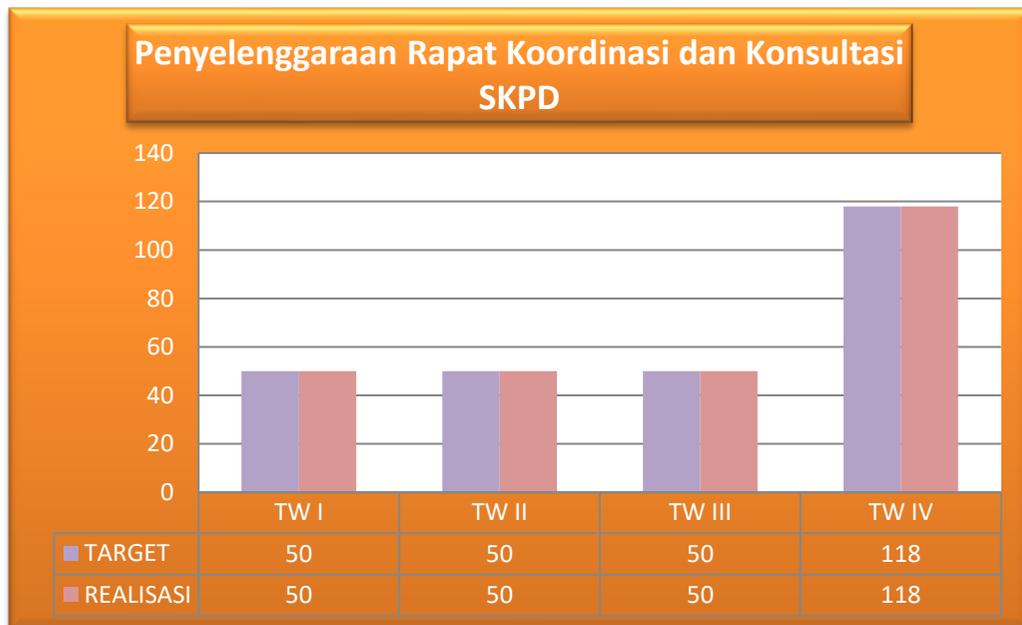
e. Fasilitasi Kunjungan Tamu



Grafik 3.36
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya, dengan target sebanyak 196 orang dan terealisasi 196 orang dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 8.820.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 8.800.400,- (99,78%).

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

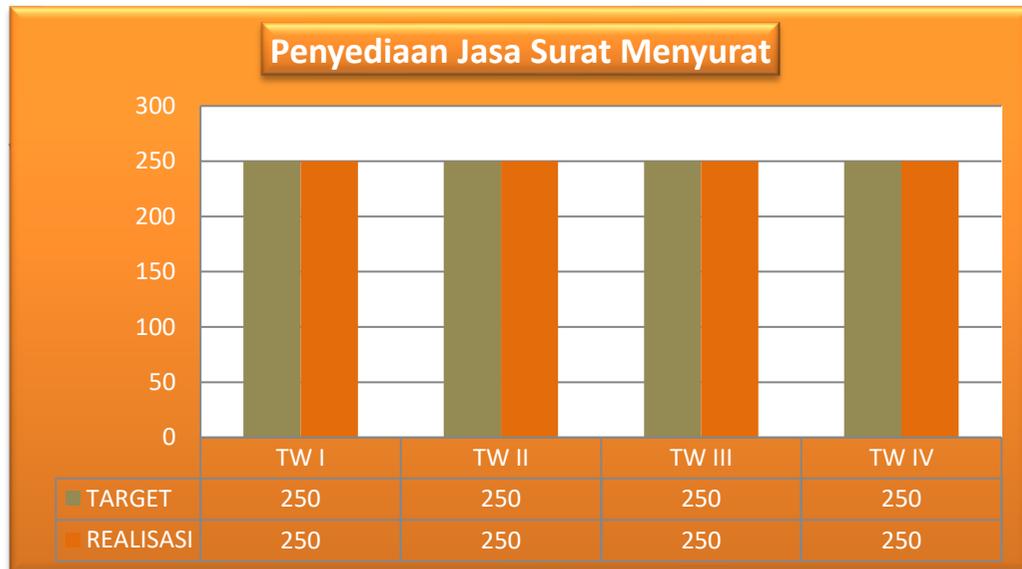


Grafik 3.37
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, dengan target sebanyak 268 kali dan terealisasi 268 kali dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 346.208.200,- dengan realisasi keuangan Rp. 342.123.589,- (98,82%).

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Grafik 3.38
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, dengan target sebanyak 1000 surat dan terealisasi 1000 surat dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 1.470.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.420.800,- (96,65%).

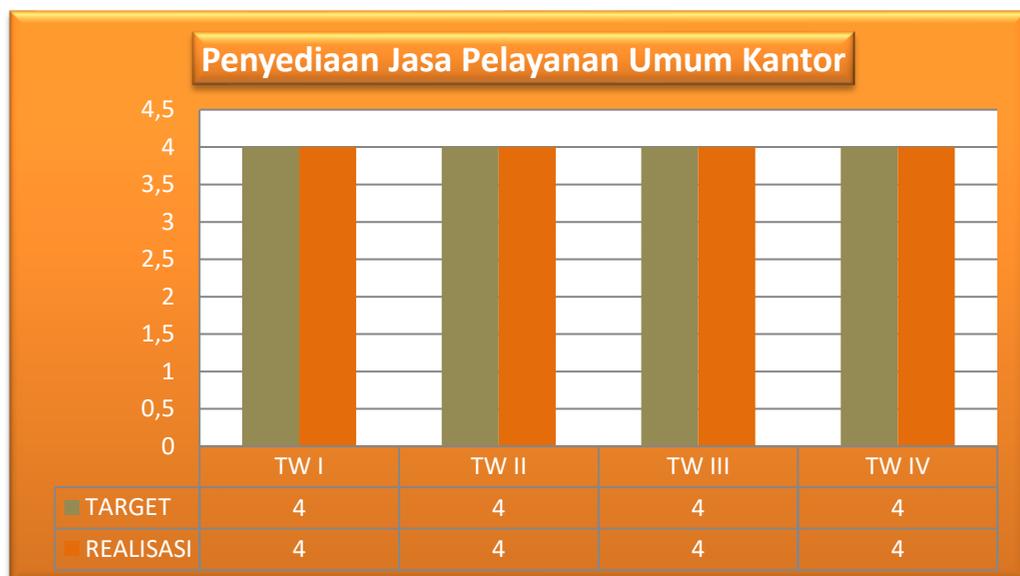
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Grafik 3.39
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, dengan target sebanyak 36 rekening dan terealisasi 36 rekening dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 101.138.424,- dengan realisasi keuangan Rp. 84.585.740,- (83,63%).

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



Grafik 3.40
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan, dengan target sebanyak 4 orang dan terealisasi 4 orang dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 55.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 55.800.000,- (100%).

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



Grafik 3.41

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, dengan target sebanyak 9 unit dan terealisasi 9 unit dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 47.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 34.136.100,- (76,63%). Terdapat sisa anggaran pada belanja jasa service, suku cadang, pelumas, STNK karena anggaran bersifat disediakan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

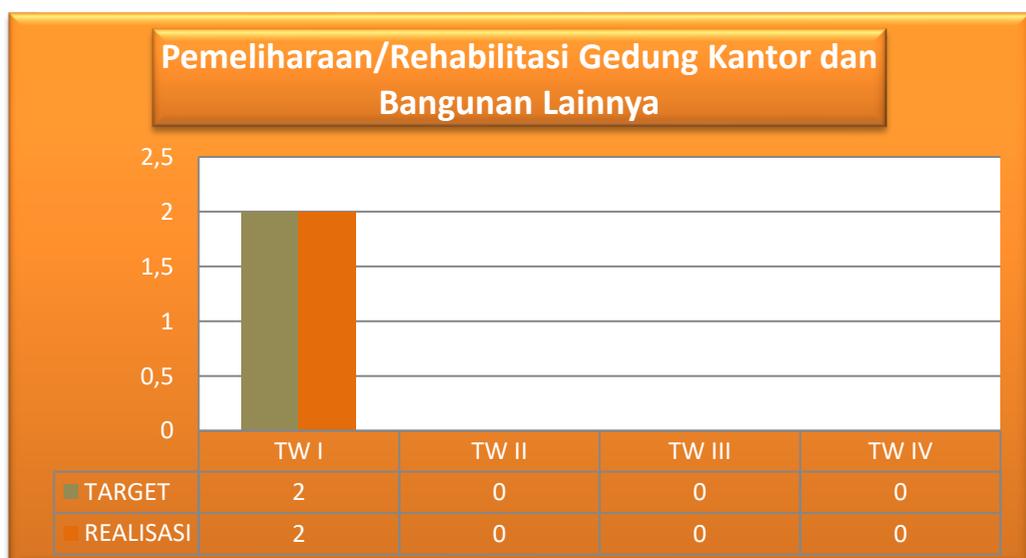


Grafik 3.42

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

Indikator kinerja sub Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dengan target sebanyak 32 unit dan terealisasi 32 unit dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 17.400.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 9.400.000,- (54,02%). Terdapat sisa anggaran karena anggaran bersifat disediakan.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Grafik 3.43

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

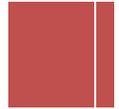
Indikator kinerja sub Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, dengan target sebanyak 2 unit dan terealisasi 2 unit dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 146.890.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 143.710.000,- (97,84%). Terdapat sisa anggaran karena anggaran bersifat disediakan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebesar sebesar **Rp. 9.531.102.050,-** (*Sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu lima puluh rupiah*), terdiri dari belanja operasi **Rp 8.691.172.050,-** dan belanja modal **Rp 839.930.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 10 program, 18 kegiatan serta 39 sub kegiatan.

Rincian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :



NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN S.D 30 SEPTEMBER 2023		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.000.000	68.068.000	170,17	(28.068.000)	(70,17)
	RETRIBUSI DAERAH	40.000.000	68.068.000	170,17	(28.068.000)	(70,17)
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	40.000.000	68.068.000	170,17	(28.068.000)	(70,17)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.117.729.856	3.998.901.744	97,11	118.828.112	2,89
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	140.342.500	133.553.240	95,16	6.789.260	4,84
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.315.000	46.300.020	92,02	4.014.980	7,98
	Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (Honorarium Perencana SKPD)	9.000.000	7.500.000	83,33	1.500.000	16,67
	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.375.000	1.209.900	87,99	165.100	12,01
	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	1.700.000	1.593.120	93,71	106.880	6,29
	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	550.000	222.000	40,36	328.000	59,64
	Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	-	-
	Perjalanan Dinas Biasa	13.690.000	11.775.000	86,01	1.915.000	13,99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.516.500	3.409.620	96,96	106.880	3,04
	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	1.416.500	1.309.620	92,45	106.880	7,55
	Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	2.100.000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.298.000	1.103.000	84,9769	195.000	15,02
	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	1.298.000	1.103.000	84,98	195.000	15,02

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.213.000	82.740.600	97,10	2.145.450	2,52
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	636.000	505.200	79,43	130.800	20,57
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.567.000	1.370.850	87,48	196.150	12,52
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	1.840.000	1.726.440	93,83	113.560	6,17
Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	3.500.000	100,00	-	-
Perjalanan Dinas Biasa	77.670.000	75.638.110	97,38	2.031.890	2,62
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.871.096.192	2.825.546.285	98,41	45.549.907	1,59
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.779.866.192	2.734.599.095	98,37	45.267.097	1,63
Gaji Pokok ASN	1.190.607.280	1.173.378.180	98,55	17.229.100	1,45
Tunjangan Keluarga ASN	132.417.862	129.948.080	98,13	2.469.782	1,87
Tunjangan Jabatan ASN	157.190.000	154.540.000	98,31	2.650.000	1,69
Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.778.750	26.640.000	99,48	138.750	0,52
Tunjangan Beras ASN	79.589.580	78.141.180	98,18	1.448.400	1,82
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.243.663	3.163.096	97,52	80.567	2,48
Pembulatan Gaji ASN	85.015	15.992	18,81	69.023	81,19
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.189.954.042	1.168.772.567	98,22	21.181.475	1,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	91.230.000	90.947.190	99,69	282.810	0,31
Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	26.280.000	26.280.000	100,00	-	-
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	1.930.000	1.745.460	90,44	184.540	9,56
Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	-	-
Perjalanan Dinas Biasa	39.020.000	38.921.730	99,75	98.270	0,25

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	27.095.000	25.477.380	94,0298	1.617.620	5,97
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.095.000	25.477.380	94,03	1.617.620	5,97
Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (Honorarium Pengurus Barang)	13.800.000	13.800.000	100,00	-	-
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	3.630.000	2.415.470	66,54	1.214.530	33,46
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.425.000	1.226.550	86,07	198.450	13,93
Perjalann Dinas Biasa	8.240.000	8.035.360	97,52	204.640	2,48
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	133.446.540	124.416.510	93,2332	9.030.030	6,77
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.250.000	29.250.000	100,00	828.060	2,83
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	29.250.000	29.250.000	100,00	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.176.540	32.690.010	98,53	486.530	1,47
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	756.540	588.510	77,79	168.030	22,21
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.450.000	1.276.500	88,03	173.500	11,97
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
Perjalanan Dinas Biasa	18.970.000	18.825.000	99,24	145.000	0,76
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	71.020.000	62.476.500	87,97	8.543.500	12,03
Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000	31.500.000	78,75	8.500.000	21,25
Perjalanan Dinas Biasa	31.020.000	30.976.500	99,86	43.500	0,14
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	374.311.200	368.476.689	98,4413	5.834.511	1,56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.325.000	5.720.000	90,43	605.000	9,57
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	6.325.000	5.720.000	90,43	605.000	9,57

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.168.000	4.166.000	99,95	2.000	0,05
Bahan-bahan lainnya	4.168.000	4.166.000	99,95	2.000	0,05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.290.000	3.766.700	87,80	523.300	12,20
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.290.000	3.766.700	87,80	523.300	12,20
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	3.900.000	86,67	600.000	13,33
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.500.000	3.900.000	86,67	600.000	13,33
Fasilitas Kunjungan Tamu	8.820.000	8.800.400	99,78	19.600	0,22
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.820.000	8.800.400	99,78	19.600	0,22
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.208.200	342.123.589	98,82	4.084.611	1,18
Jasa Tenaga Sopir	36.000.000	36.000.000	100,00	-	-
Perjalanan Dinas Biasa	310.208.200	306.123.589	98,68	4.084.611	1,32
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	201.740.000	192.379.000	-	4.261.000	2,11
Pengadaan Mebel	51.750.000	46.650.000	90,14	5.100.000	9,86
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	22.250.000	20.500.000	-	1.750.000	7,87
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	17.000.000	16.650.000	-	350.000	2,06
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.500.000	9.500.000	-	3.000.000	24,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.990.000	145.729.000	97,16	4.261.000	2,84
Belanja Modal Alat Pendingin	18.000.000	17.700.000	-	300.000	1,67
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000	9.500.000	-	500.000	5,00
Belanja Modal Personal Computer	34.000.000	33.300.000	-	700.000	2,06
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	87.990.000	85.229.000	96,86	2.761.000	3,14
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	158.408.424	141.806.540	89,52	16.601.884	10,48

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.470.000	1.420.800	96,65	49.200	3,35
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	150.000	127.650	85,10	22.350	14,90
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	210.000	183.150	-	26.850	12,79
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	1.110.000	1.110.000	100,00	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.138.424	84.585.740	83,63	16.552.684	16,37
Belanja Tagihan Air	2.880.000	1.606.950	55,80	1.273.050	44,20
Belanja Tagihan Listrik	98.258.424	82.978.790	84,45	15.279.634	15,55
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.800.000	55.800.000	100,00	-	-
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Pejabat Pengadaan)	4.800.000	4.800.000	100,00	-	-
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	51.000.000	51.000.000	100,00	-	-
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH	211.290.000	187.246.100	88,62	21.753.900	10,30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	47.000.000	34.136.100	72,63	12.863.900	27,37
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	6.900.000	3.925.000	56,88	2.975.000	43,12
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.600.000	3.515.000	36,61	6.085.000	63,39
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	30.500.000	26.696.100	87,53	3.803.900	12,47
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.400.000	9.400.000	54,02	8.000.000	45,98
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	17.400.000	9.400.000	54,02	8.000.000	45,98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.890.000	143.710.000	97,84	890.000	0,61

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	31.000.000	28.710.000	92,61	2.290.000	7,39
Belanja Modal bangunan Gedung Kantor	115.890.000	115.000.000	99,23	890.000	0,77
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	203.846.940	199.075.029	97,66	4.771.911	2,34
PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	203.846.940	199.075.029	97,66	4.771.911	2,34
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	203.846.940	199.075.029	97,66	4.771.911	2,34
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	926.140	753.690	81,38	172.450	18,62
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.200.000	1.056.000	88,00	144.000	12,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.425.800	1.353.300	-	72.500	5,08
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	875.000	777.000	88,80	98.000	11,20
Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000	6.300.000	100,00	-	-
Honorium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	120.000.000	120.000.000	100,00	-	-
Sewa Bangunan Gedung dan Tempat Pertemuan	2.000.000	1.000.000	50,00	1.000.000	50,00
Sewa Hotel	4.200.000	3.150.000	75,00	1.050.000	25,00
Perjalanan Dinas Biasa	66.920.000	64.685.039	96,66	2.234.961	3,34
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	804.305.412	674.361.663	83,84	129.943.749	16,16
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	732.503.550	602.720.373	82,28	129.783.177	17,72
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	101.465.000	95.674.406	94,29	5.790.594	5,71

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	335.000	316.350	94,43	18.650	5,57
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	720.000	632.700	87,88	87.300	12,13
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	900.000	840.000	-	60.000	6,67
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	444.000	88,80	56.000	11,20
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.360.000	1.272.000	93,53	88.000	6,47
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	2.800.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	22.000.000	16.705.000	-	5.295.000	24,07
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	10.000.000	10.000.000	-	-	-
Perjalanan Dinas Biasa	62.850.000	62.664.356	99,70	185.644	0,30
Pengelolaan Laboratorium LH Kabupaten	631.038.550	507.045.967	80,35	123.992.583	19,65
Belanja Bahan-Bahan Kimia	131.752.000	131.727.000	-	25.000	0,02
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan ATK	1.996.550	1.651.620	82,72	344.930	17,28
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	4.400.000	3.818.400	86,78	581.600	13,22
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	444.000	88,80	56.000	11,20
Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	3.500.000	100,00	-	-
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	72.000.000	68.000.000	94,44	4.000.000	5,56
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.200.000	-	-	1.200.000	100,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Udara Lainnya	10.000.000	7.356.227	73,56	2.643.773	26,44
Sewa Hotel	2.000.000	1.540.000	77,00	460.000	23,00

Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Lab-Alat Lab Kimia	10.800.000	9.620.000	-	1.180.000	10,93
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	15.260.000	-	-	15.260.000	100,00
Perjalanan Dinas Biasa	104.980.000	104.362.400	99,41	617.600	0,59
Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	70.650.000	16.476.320	23,32	54.173.680	76,68
Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	177.000.000	139.050.000	-	37.950.000	21,44
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	25.000.000	19.500.000	-	5.500.000	22,00
PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KABUPATEN/KOTA	71.801.862	71.641.290	99,78	160.572	0,22
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	71.801.862	71.641.290	99,78	160.572	0,22
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan ATK	121.862	79.920	65,58	41.942	34,42
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	290.000	255.300	88,03	34.700	11,97
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	150.000	144.000	-	6.000	4,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian Dan Pangan	3.500.000	3.500.000	-	-	-
Perjalanan Dinas Biasa	67.740.000	67.662.070	99,88	77.930	0,12
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	147.909.060	135.740.816	91,77	12.168.244	8,23
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	147.909.060	135.740.816	91,77	12.168.244	8,23
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	147.909.060	135.740.816	91,77	12.168.244	8,23



Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.000.000	10.000.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.060	63.900	86,28	10.160	13,72
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	710.000	613.000	86,34	97.000	13,66
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	105.000	87.500	83,33	17.500	16,67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	100,00	-	-
Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000	1.750.000	100,00	-	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	36.000.000	28.500.000	79,17	7.500.000	20,83
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Untuk Taman	80.300.000	75.826.416	-	4.473.584	5,57
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.770.000	18.700.000	99,63	70.000	0,37
PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	59.854.060	59.709.660	99,76	144.400	0,24
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	59.854.060	59.709.660	99,76	144.400	0,24
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	59.854.060	59.709.660	99,76	144.400	0,24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.060	63.900	86,28	10.160	13,72
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	290.000	248.000	85,52	42.000	14,48
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	75.000	62.500	83,33	12.500	16,67
Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000	2.625.000	100,00	-	-
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.790.000	44.710.260	99,82	79.740	0,18

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	126.208.000	122.964.506	97,43	3.178.014	2,52
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.208.000	122.964.506	97,43	3.178.014	2,52
Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	57.275.000	56.744.096	99,07	530.904	0,93
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	425.000	283.050	66,60	141.950	33,40
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	300.000	266.400	88,80	33.600	11,20
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	444.000	88,80	56.000	11,20
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.050.000	55.750.646	99,47	299.354	0,53
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.658.000	33.040.890	98,17	617.110	1,83
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.000	43.290	68,71	19.710	31,29
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	225.000	199.800	88,80	25.200	11,20
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.000	111.000	88,80	14.000	11,20
Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000	1.575.000	100,00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.670.000	31.111.800	98,24	558.200	1,76
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	35.275.000	33.179.520	94,06	2.030.000	5,75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	545.000	479.520	87,99	65.480	12,01

Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	22.000.000	91,67	2.000.000	8,33
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.730.000	10.700.000	99,72	30.000	0,28
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	27.095.000	26.841.641	99,06	253.359	0,94
PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	27.095.000	26.841.641	99,06	253.359	0,94
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	27.095.000	26.841.641	99,06	253.359	0,94
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	365.000	321.900	88,19	43.100	11,81
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	600.000	585.000	97,50	15.000	2,50
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.250.000	1.110.000	88,80	140.000	11,20
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	1.050.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.830.000	23.774.741	-	55.259	0,23
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	55.683.262	53.867.208	96,74	1.816.054	3,26
PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.683.262	53.867.208	96,74	1.816.054	3,26
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	55.683.262	53.867.208	96,74	1.816.054	3,26



Hidup					
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	308.262	268.020	86,95	40.242	13,05
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	370.000	255.300	69,00	114.700	31,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000	300.000	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000	2.625.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.080.000	50.418.888	96,81	1.661.112	3,19
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	18.595.000	13.998.600	75,28	21.400	0,12
PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	18.595.000	13.998.600	75,28	21.400	0,12
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	18.595.000	13.998.600	75,28	21.400	0,12
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000	-	-	1.575.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3.000.000	-	-	3.000.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.020.000	13.998.600	99,85	21.400	0,15
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.969.875.460	3.675.459.626	92,58	294.415.834	7,42
PENGELOLAAN SAMPAH	3.969.875.460	3.675.459.626	92,58	294.415.834	7,42
Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.591.706.400	3.314.586.799	92,28	277.119.601	7,72
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	338.066.400	211.414.100	62,54	126.652.300	37,46

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.800	68.440	96,67	2.360	3,33
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.800.000	22.800.000	100,00	-	-
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.177.800.000	2.139.700.000	98,25	38.100.000	1,75
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.000.000	21.000.000	100,00	-	-
Belanja Lembur	56.992.000	54.288.000	95,26	2.704.000	4,74
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Axcavator	32.000.000	31.909.000	-	91.000	0,28
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	32.000.000	32.000.000	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	211.400.000	211.120.000	99,87	280.000	0,13
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	584.727.200	485.386.300	83,01	99.340.900	16,99
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	26.600.000	16.820.500	63,23	9.779.500	36,77
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Alat Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	2.750.000	2.740.000	99,64	10.000	0,36
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.500.000	43.378.209	99,72	121.791	0,28
Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	30.000.000	29.962.250	99,87	37.750	0,13
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	64.439.060	64.286.367	99,76	152.693	0,24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	74.060	63.900	86,28	10.160	13,72
Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	290.000	248.000	85,52	42.000	14,48
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	75.000	62.500	83,33	12.500	16,67
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	3.500.000	100,00	-	-

Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	4.000.000	4.000.000	100,00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.500.000	56.411.967	99,84	88.033	0,16
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	313.730.000	296.586.460	94,54	17.143.540	5,46
Belanja Bahan-bahan Lainnya	103.730.000	102.837.060	99,14	892.940	0,86
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	198.000.000	181.749.400	91,79	16.250.600	8,21
	9.531.102.050	8.960.920.493	94,02	570.181.557	5,98

Tabel.3.27
Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023
Kabupaten Luwu Timur



BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup kab Luwu Timur Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dari perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator kinerja utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Dalam pencapaian target sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengalami beberapa kendala antara lain :
 - Perubahan aturan mengenai perhitungan IKLH (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang mengatur mengenai perubahan rumus/formulasi, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan.
 - Nilai IKA Kabupaten Luwu Timur yang berubah secara signifikan. Hasil perhitungan IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 berdasarkan data



pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,92 sedangkan target IKA pada tahun 2023 sebesar 28.00. Nilai IKA yang diperoleh belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan rumus, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan. Perhitungan IKA pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

- Pengujian Sampel air sungai dan danau dilakukan di 2 Laboratorium yakni Laboratorium Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan dan Laboratorium di UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan 25 parameter sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses pembuatan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- Keterlambatan pengiriman data hasil pengukuran kualitas udara ambien metode *Passive Sampler* dari Direktorat Pengendalian Pencemaran yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU).
- Kurangnya data mengenai lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Fungsi koordinasi yang belum optimal antar instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sehingga terkadang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan sesuai rencana.
- Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran.



- Sarana dan prasarana pendukung belum lengkap.
- Terbatasnya aparatur Dinas Lingkungan Hidup baik dari segi kualitas dan kuantitas.
- Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
 - Meningkatkan Pengawasan kegiatan Usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll.
 - Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL.
 - Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang baru.
 - Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga bisa mempercepat hasil pengujian dan tidak menghambat dalam proses penyusunan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan adanya kendala dan strategi pemecahan masalah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur kedepannya sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan

kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Malili, Januari 2024

Kepala Dinas,



DRS. ANDI MAKKARAKA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650406 198603 1 017



**L
A
M
P
I
R
A
N**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama
KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR

Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	28 Point
		Indeks Kualitas Udara	29.60 Point
		Indeks Tutupan Lahan	30.50 Point
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	60.57 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 3,744.328.656.00	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 324.576.940.00	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 618.975.412.00	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 147.909.060.00	APBD
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 59.854.060.00	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 109.303.000.00	APBD
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Rp 15,290,000.00	APBD
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 33.543.262.00	APBD



No	Program	Anggaran	Keterangan
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 10,920,000.00	APBD
10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 3,554,615,460.00	APBD
JUMLAH		Rp 8.619.315.850.00	APBD

Malili, Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI LUWU TIMUR


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama
KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR


Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si